



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas**

**Disampaikan oleh
Dadang Solihin**

Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas

Pada Musrenbang RKPD Provinsi Aceh

Banda Aceh, 9 April 2015

MUSRENBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2016

"Aceh Sejahtera dan Mandiri Melalui Pemenuhan Aksesibilitas,
Peningkatan Investasi dan Penciptaan Kedaulatan Pangan"

Banda Aceh, 09 April 2015





PEMERINTAH ACEH

MUSRENBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPA) TAHUN 2016

"Aksi Berkeadilan dan Mandiri Melalui Pemenuhan Akses
Peningkatan Prestasi dan Pencapaian Kedaulatan Rakyat
2015



 **Dadang Solihin**



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>



KERANGKA PAPARAN



- ❑ **RPJMN 2015-2019 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**
 - Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
 - Sasaran Nasional RKP 2016
 - Sasaran Pembangunan Aceh
- ❑ **Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Aceh**
- ❑ **Penutup**
 - Rangkuman Permasalahan Pembangunan
 - Isu Strategis Pembangunan
 - Rekomendasi dan Saran



VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019



VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA



1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman** pada seluruh WN
2. Membangun **tata kelola Pemerintahan** yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan **reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial



STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA



**SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
RPJMN 2015-2019**



SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019



Indikator	2014* (Baseline)	2015	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83 (metode lama)	69,4 (metode baru)	76,3 (metode lama)
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat ¹	0,55	-	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,40	0,36
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	5,7%	8,0 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	-	72.217
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	-	
▪ Tingkat Kemiskinan	10,96 % *)	10,3	7,0-8,0%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	5,6%	4,0-5,0%

¹ Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

*Perkiraan

**Maret 2014



SASARAN NASIONAL RKP 2016

	Perkiraan 2014	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)*)	5,1	5,7	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp) *)	43.403	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000
Neraca Pembayaran						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Keuangan Negara **)						
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	0,0
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	23,9	26,7	23,3	22,3	21,1	19,3
Utang Luar Negeri	6,2	5,3	4,8	4,2	3,8	3,3
Utang Dalam Negeri	17,7	18,7	18,6	18,2	17,7	16,7
Pengangguran dan Kemiskinan (%)						
Tingkat Pengangguran	5,9	5,6	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Tingkat Kemiskinan	10,96***)	10,3	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0

Keterangan:

*) Berdasarkan PDB tahun dasar 2010

***) Tahun 2015 menggunakan Angka RAPBN-P 2015, penerimaan pajak tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah sebesar 1 persen PDB

****) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.



SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3)



Pendidikan

Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pendidikan		
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun)	8,8 (tahun)
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1%	96,1 (%)
▪ Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4%	68,4 (%)
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	84,2%
▪ Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	81,0%
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	84,6%
▪ Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	65,0%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,60

Arah Kebijakan

Pendidikan

1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas
3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan
6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran



SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (2/3)



Pembangunan Kesehatan

No	Indikator	2014 (Baseline)	2019
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	346 (SDKI 2012)	306
	2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
	4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)	32,9 (2013)	28
2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	2. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2013)	<0,5
	3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4(2013)	15,4
	5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun	7,2 (2013)	5,4
3	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	5.600
	2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
	3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015	5.600

Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan



SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (3/3)



Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2019
Akses Air Minum Layak	70%	100%
Akses Sanitasi Layak	60,9%	100%
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	38.431 Ha	0 Ha
Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni	7,6 Juta	5 Juta

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi



SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangan)



INDIKATOR	2014 (baseline)	2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan		
- Padi (Juta Ton)	70,6	82,0
- Jagung (Juta Ton)	19,13	24,1
- Kedelai (Juta Ton)	0,92	2,6
- Gula (Juta Ton)	2,6	3,8
- Daging Sapi (Ribu Ton)	452,7	755,1
- Produksi perikanan (juta ton)	12,4	18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:		
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	8,9	9,89
- Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	2,71	3,01
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	189,75	304,75
- Pembangunan waduk)*	21	49

CACATAN:

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk ke-4 tahun fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

ARAH KEBIJAKAN:

- 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi:** (i) penyelesaian pengaman lahan berkelanjutan (**menahan konversi sawah**) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; **Produk perikanan:** 40 juta ton (ikan dll)**
- 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan:** (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan.
- 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat:** (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras.
- 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan:** (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

* Kumulatif 5 tahun



SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Energi)



INDIKATOR	2014 (baseline)	2019*
Rasio elektrifikasi	81,5%	96,6%
Konsumsi Listrik Perkapita	843KWh	1.200KWh
Peningkatan Produksi SD Energi:		
- Minyak Bumi (ribu BM/hari)	818	700
- Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.224	1.295
- Batubara (Juta Ton)	421	400
Penggunaan DN (DMO):		
- Gas bumi DN	53%	64%
- Batubara DN	24%	60%
Regasifikasi onshore (unit)	-	6
Pembangunan FSRU (unit)	2	3
Jaringan pipa gas (km)	11.960	17.960
Pembangunan SPBG (unit)	40	118
Jaringan gas kota (sambungan rumah)	200 ribu	1 jt
Pembangunan kilang baru (unit)	-	1

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.
4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.
5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)

* Dengan badan usaha



SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Maritim dan Kelautan)



INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim		
▪ Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	13.466	17.466 (Selesai th 2017)
▪ Penyelesaian batas maritim antar negara	1 negara	9 negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar		
• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	52%	87%
Membangun Konektivitas Nasional:		
▪ Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	--	24
▪ Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	270
▪ Pembangunan kapal perintis	50 unit	104 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan		
▪ Produksi hasil perikanan (juta ton)	22,4	40-50
▪ Pengembangan pelabuhan perikanan	21 unit	24 unit
▪ Peningkatan luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	20 juta ha

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Penguatan lembaga pengawasan laut;
4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;
6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir



SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Pariwisata dan Industri)



INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Pariwisata		
▪ Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8 %
▪ Wisatawan Mancanegara (Orang)	9 juta	20 juta
▪ Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 juta	275 juta
▪ Devisa (triliun rupiah)	120	260
Industri		
Sasaran Pertumbuhan:		
▪ Industri (%)	4,7	8.6
▪ Kontribusi dalam PDB	20,7%	21,6%
▪ Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar	-	9.000 unit*

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjdai fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa
6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

* Kumulatif 5 tahun



SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1/3)



Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan		
a. Penurunan desa tertinggal		s.d. 5,000 desa tertinggal
b. Peningkatan desa mandiri		paling sedikit 2,000 desa
Pengembangan Kawasan Perbatasan		
a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	10 (187 lokasi prioritas)
b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	92 pulau kecil terluar/terdepan

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi.
3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan.
4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan.
5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi
6. Penguatan Pemerintahan Desa
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.
8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.



SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2/3)



Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pembangunan Daerah Tertinggal		
a. Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	42
b. Kabupaten terentaskan	70	80
c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% *)	7,24%
d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	14,0%
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46	69,59
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa		
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa	7	14
b. Kawasan Industri	n.a.	14
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	4

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan
2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik.
3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas.
4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA → (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.
2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .

* rata-rata 2010-2014

** di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)



SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3/3)



Indikator	2014 (Baseline)	2019
Pembangunan Kawasan Perkotaan		
a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	2+ 5(usulan baru)
b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	20 dioptimalkan perannya
c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	--	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik	--	10 Kota Baru

ARAH KEBIJAKAN:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.
2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni.
3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal.
5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.



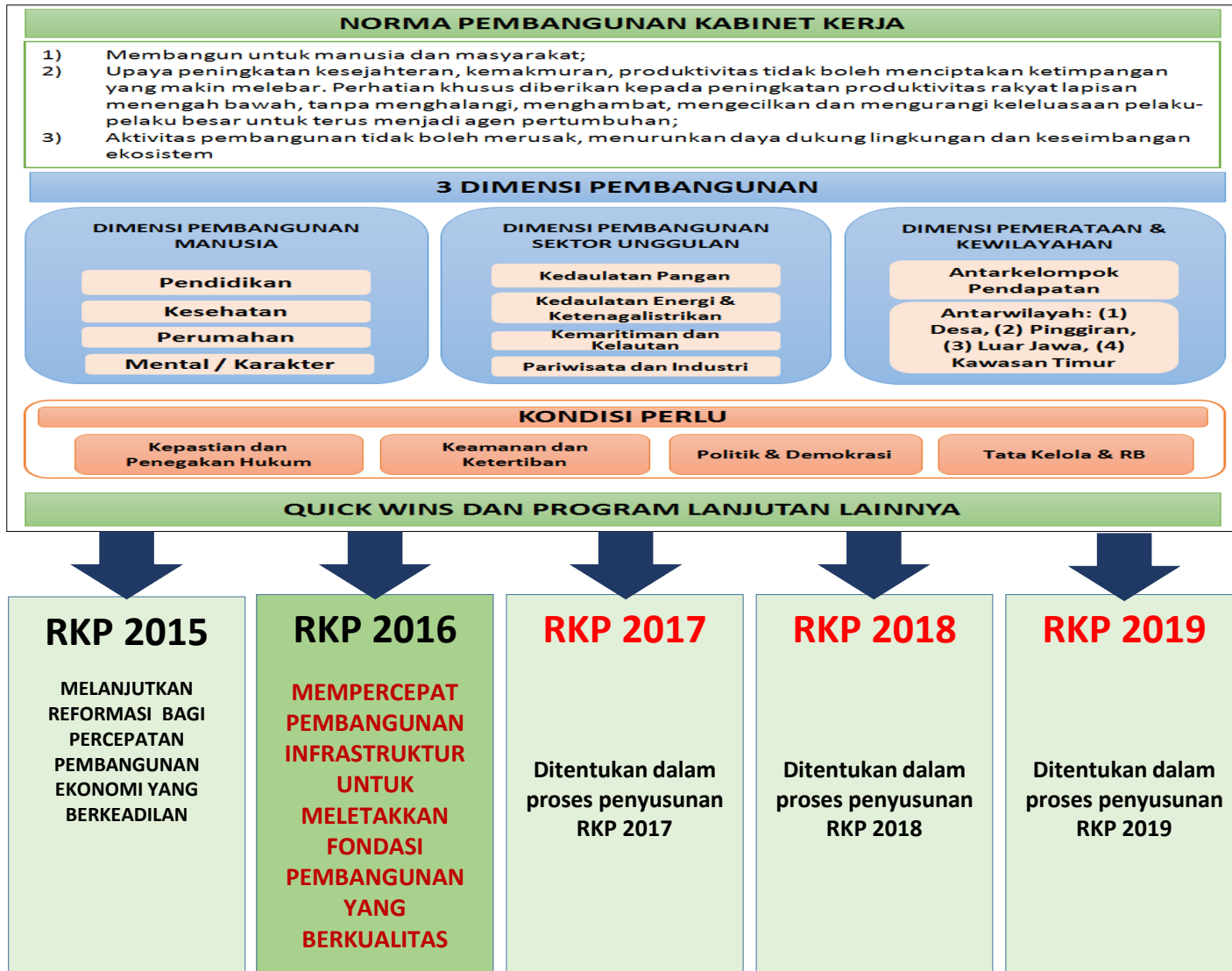
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



RANCANGAN TEMA RKP 2016



RANCANGAN TEMA RKP 2016





RANCANGAN TEMA RKP 2016



Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

- ❑ Salah satu permasalahan utama yang **menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur**, termasuk pasokan listrik.
- ❑ Pemenuhan **ketersediaan infrastruktur** merupakan salah satu **prasyarat utama** yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
- ❑ Pembangunan berkualitas adalah:
 - Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
 - Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan
- ❑ Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk **mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri** dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan



**SASARAN PEMBANGUNAN ACEH
RPJMN 2015-2019**



SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019



Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2
Sumatera Utara	6.1	6.7	7.2	7.6	8.1
Sumatera Barat	5.4	6.0	6.4	7.0	7.8
Riau	4.6	4.9	5.1	5.8	6.8
Kepulauan Riau	6.7	7.4	7.0	7.5	7.5
Jambi	6.5	7.0	7.4	8.1	8.9
Sumatera Selatan	5.8	6.1	6.2	6.7	7.5
Kep. Bangka Belitung	5.5	6.1	6.8	7.1	7.5
Bengkulu	5.9	6.7	7.3	7.7	8.4
Lampung	6.2	6.8	7.2	7.7	8.2

Sumber: Perhitungan Bappenas ,2014



SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019



Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	16.2	14.9	13.7	12.5	11.3
Sumatera Utara	9.2	8.7	8.1	7.4	6.7
Sumatera Barat	6.7	6.2	5.8	5.3	4.8
Riau	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7
Kepulauan Riau	5.1	4.6	4.3	3.8	3.4
Jambi	5.9	5.4	5.0	4.6	4.2
Sumatera Selatan	12.2	11.3	10.4	9.5	8.6
Kep. Bangka Belitung	3.9	3.6	3.3	3.0	2.7
Bengkulu	14.7	13.6	12.5	11.4	10.3
Lampung	14.1	13.6	12.6	11.5	10.5

Sumber: Perhitungan Bappenas ,2014



SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU SUMATERA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

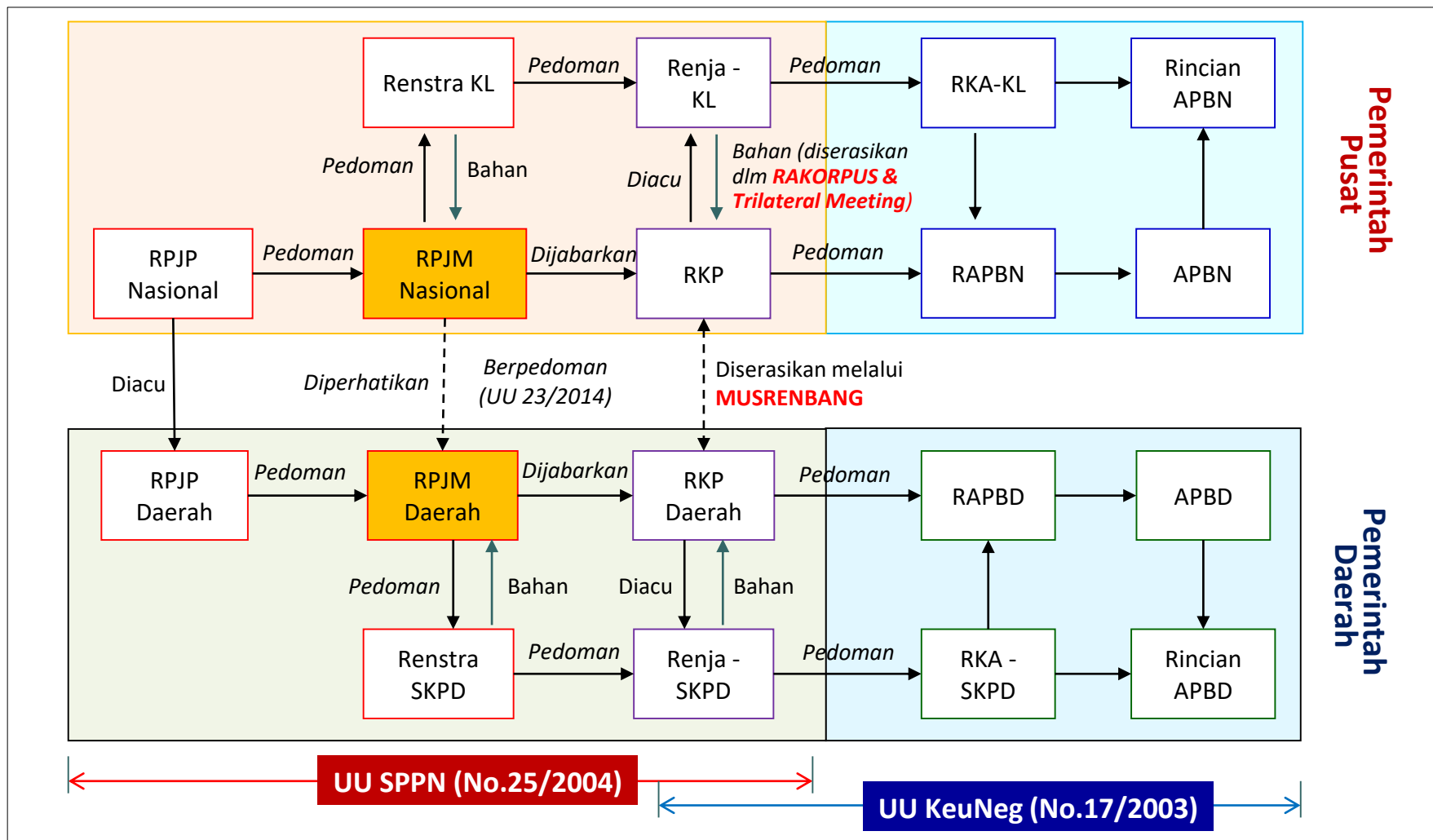


Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	8.5	8.2	7.9	7.5	7.2
Sumatera Utara	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2
Sumatera Barat	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2
Riau	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1
Kepulauan Riau	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1
Jambi	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6
Sumatera Selatan	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7
Kep. Bangka Belitung	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7
Bengkulu	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9
Lampung	4.9	4.7	4.6	4.4	4.3

Sumber: Perhitungan Bappenas ,2014

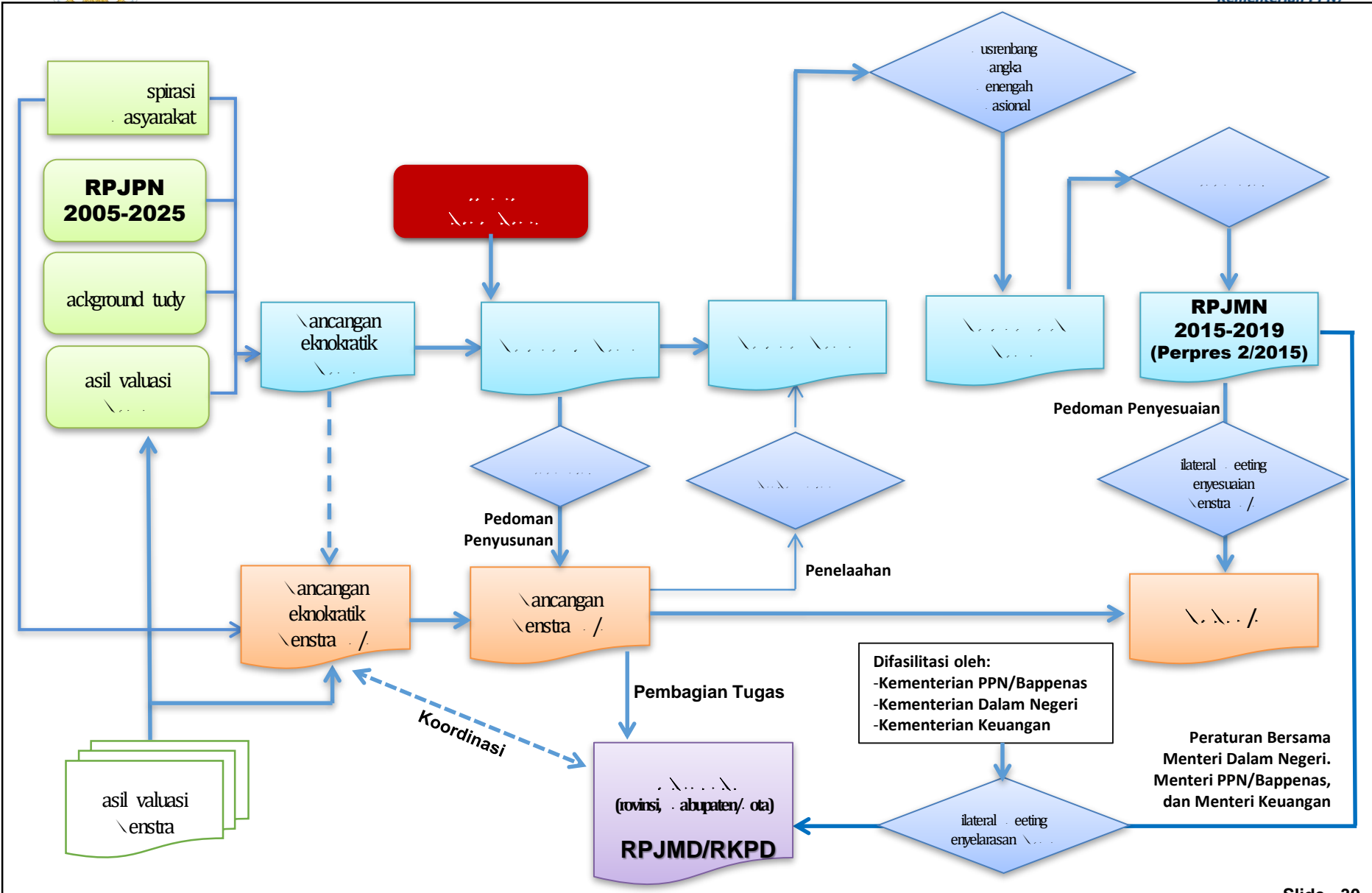


PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN DAERAH





BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN DAN PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD





PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019



Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019:

- ❑ Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan RPJMN 2015-2019.
 - i. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2015-2019.
 - ii. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019.



PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019



1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan sasaran pokok dan strategi pembangunan yang digariskan dalam kebijakan umum pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro, serta arah kebijakan dan strategi dari masing-masing agenda pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2015-2019.
2. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2015-2019, serta
3. Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2015-2019.

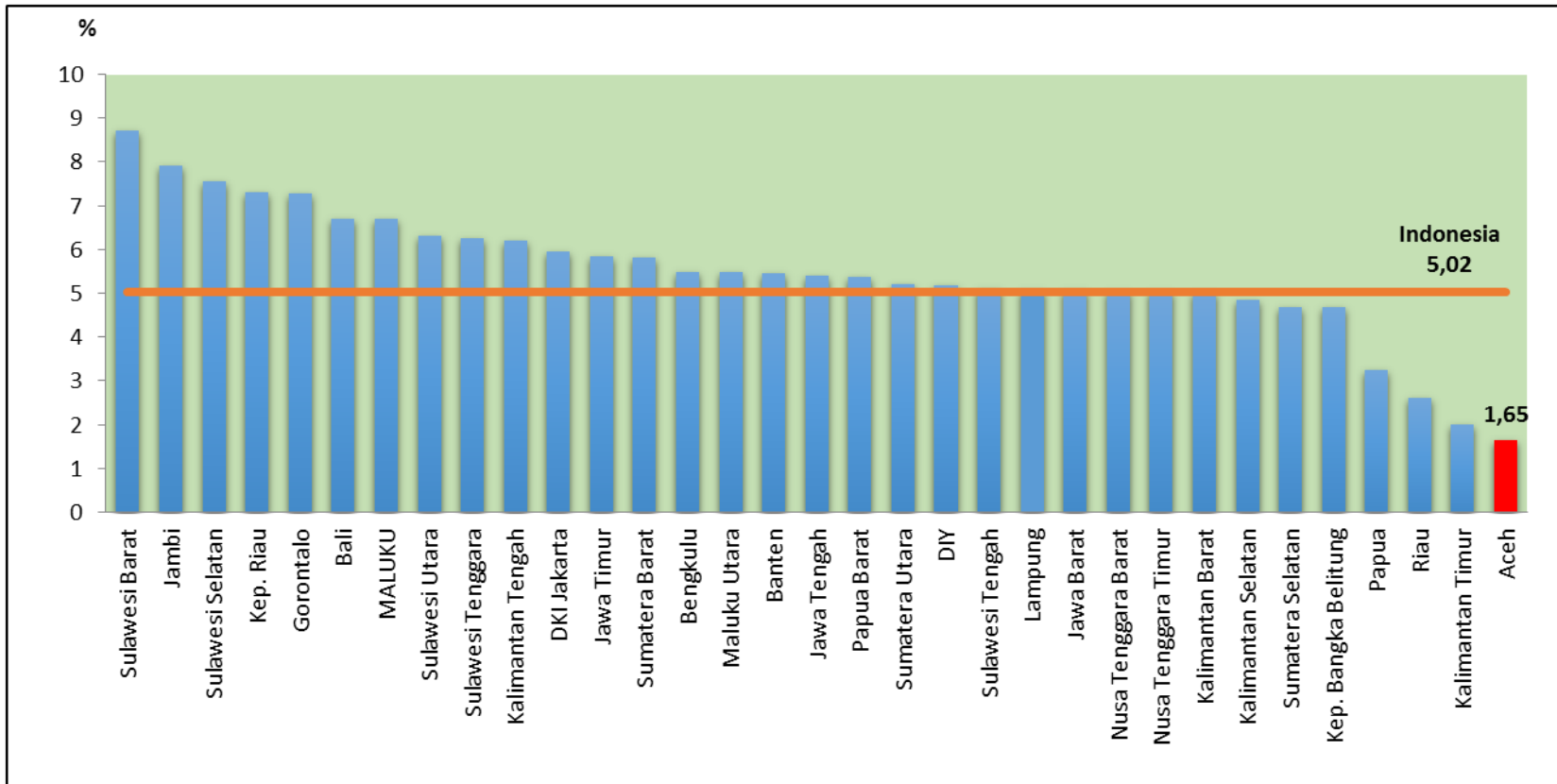


CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH

- Pertumbuhan PDRB
- Pertumbuhan PDRB per Kapita
- Tingkat Pengangguran Terbuka
- Tingkat Kemiskinan
- Kependudukan
- Kesenjangan Antar Golongan dan Antar Wilayah
- Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha
- Jumlah Orang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan



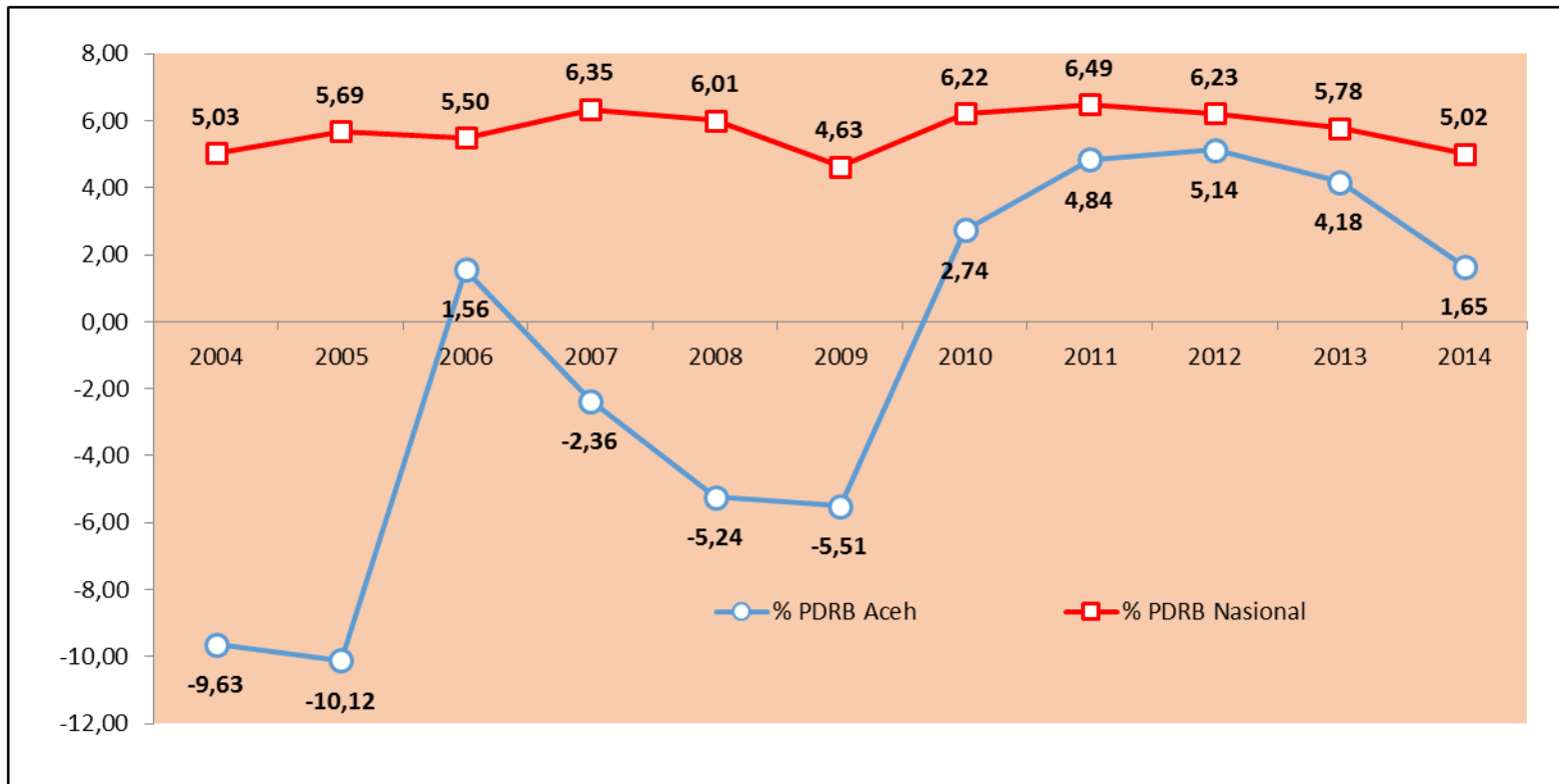
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI ACEH TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2014



Sumber: BPS, 2015



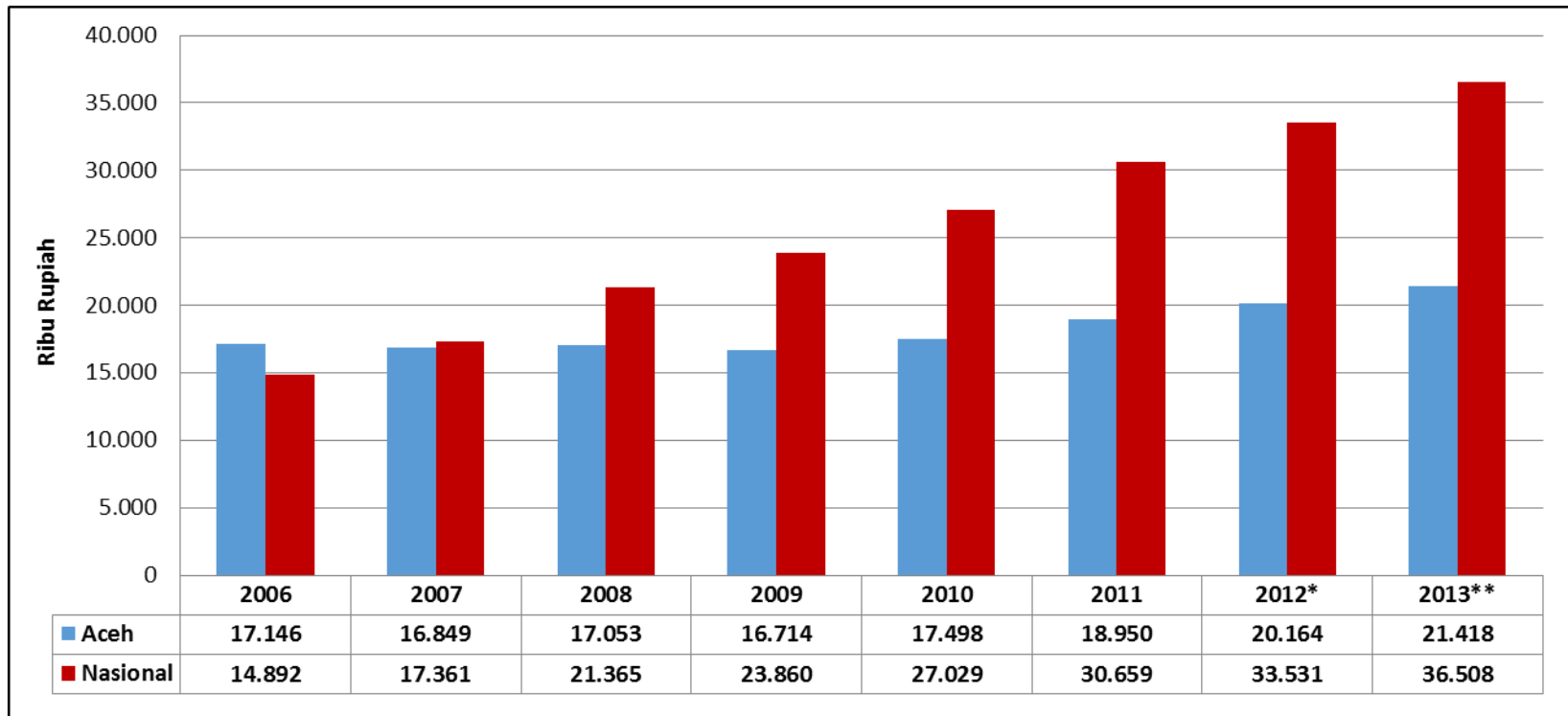
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. ACEH TERHADAP PDRB NASIONAL



Sumber: BPS, 2015



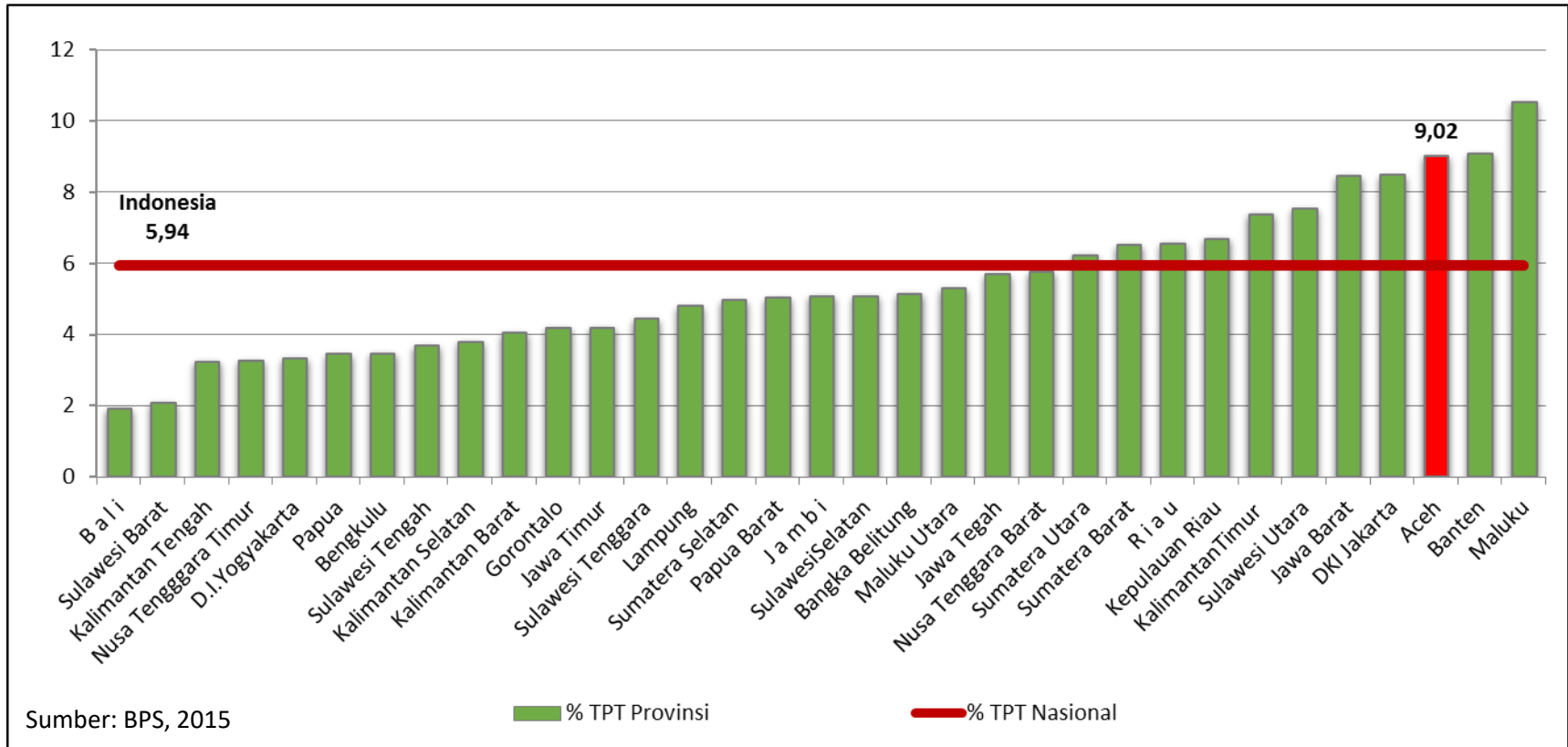
PDRB PER KAPITA PROV. ACEH TERHADAP NASIONAL



Pencapaian PDRB per kapita Aceh dari 2006 s.d 2013 selalu berada dibawah PDB per kapita Nasional



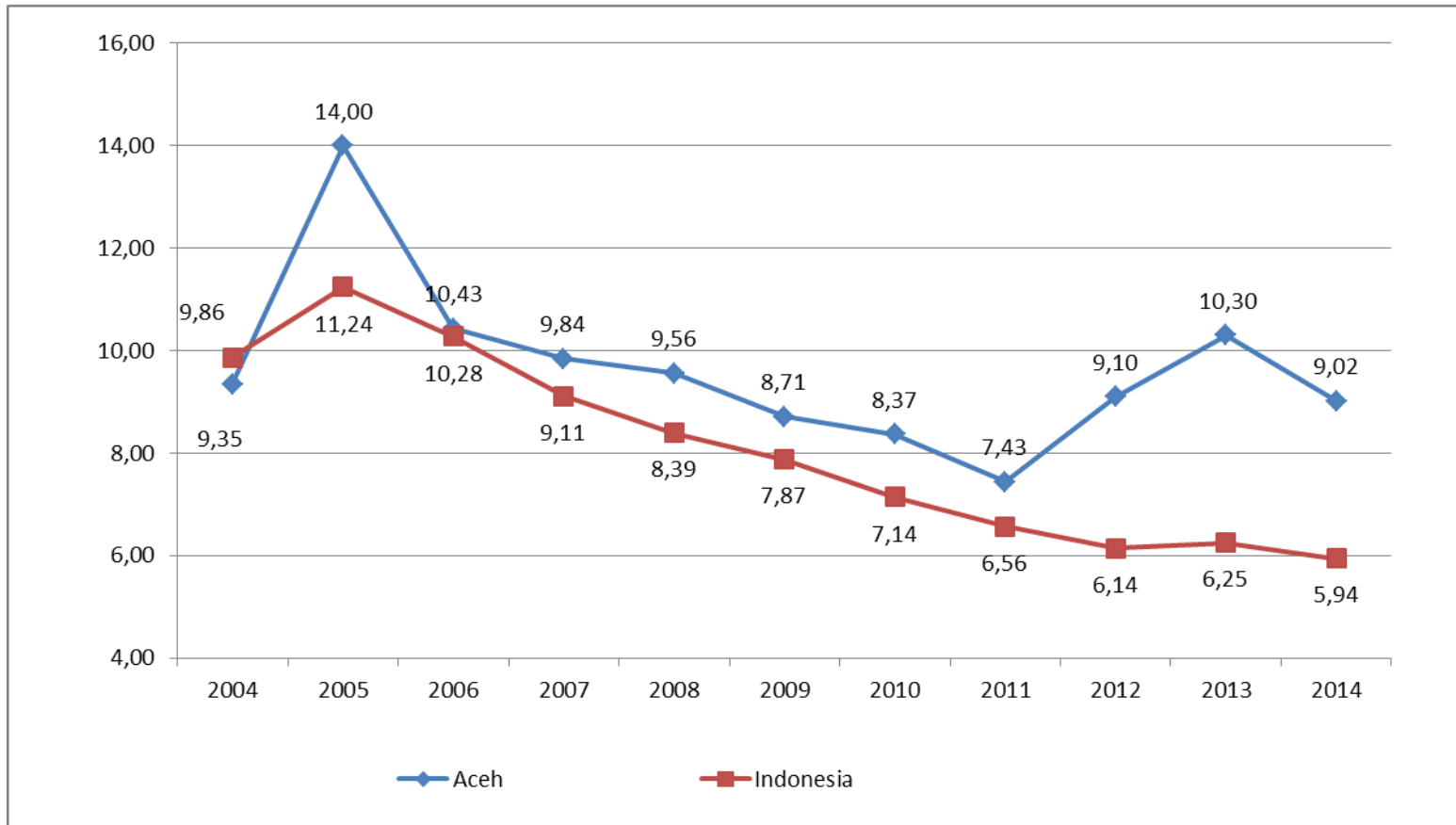
PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) ACEH TERHADAP PROVINSI LAIN (Agustus 2014)



Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh 2014 jauh berada di atas Nasional



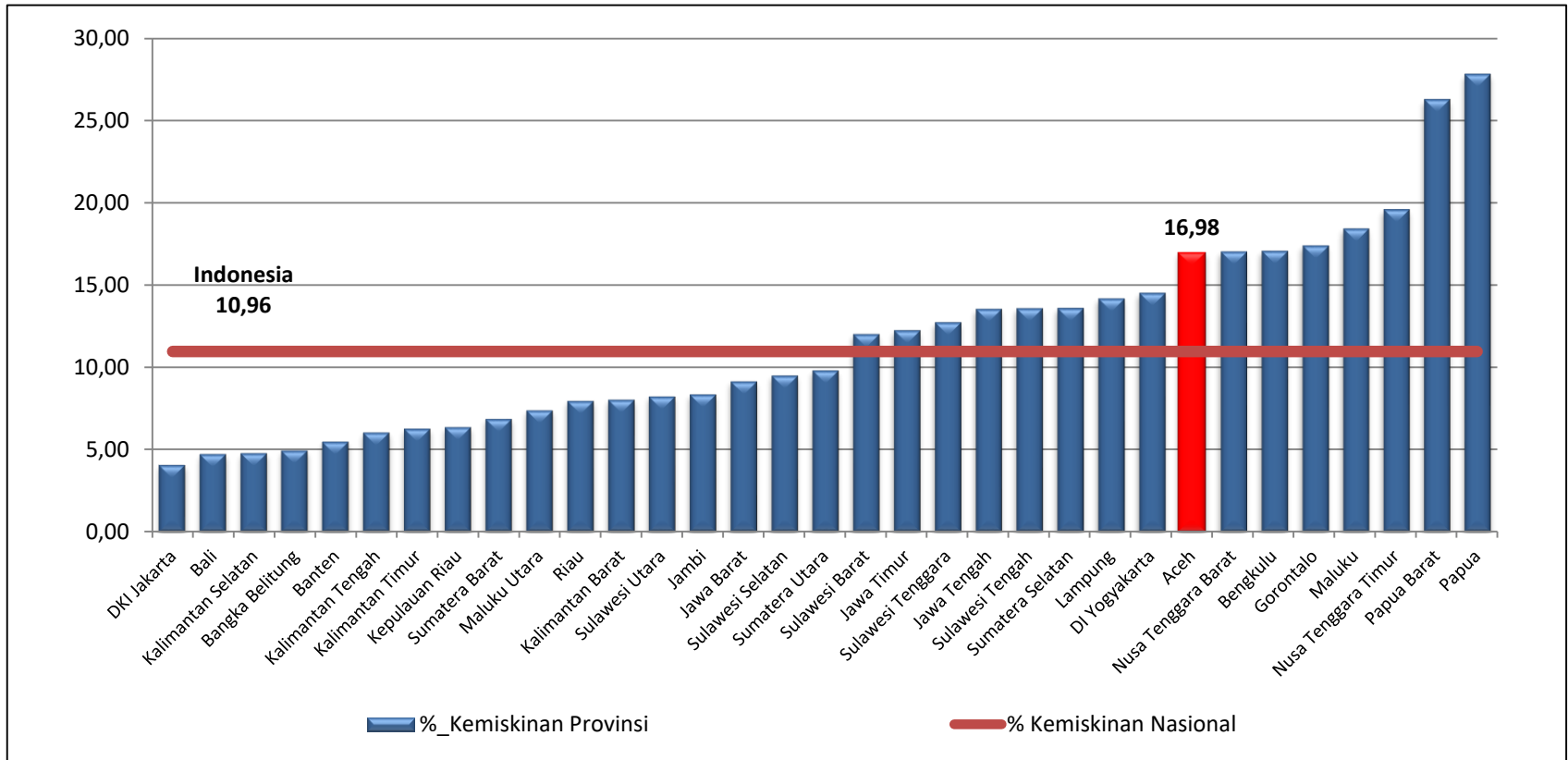
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI ACEH TERHADAP NASIONAL



Sumber: BPS, 2015



PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROV. ACEH TERHADAP PROVINSI LAIN (September 2014)

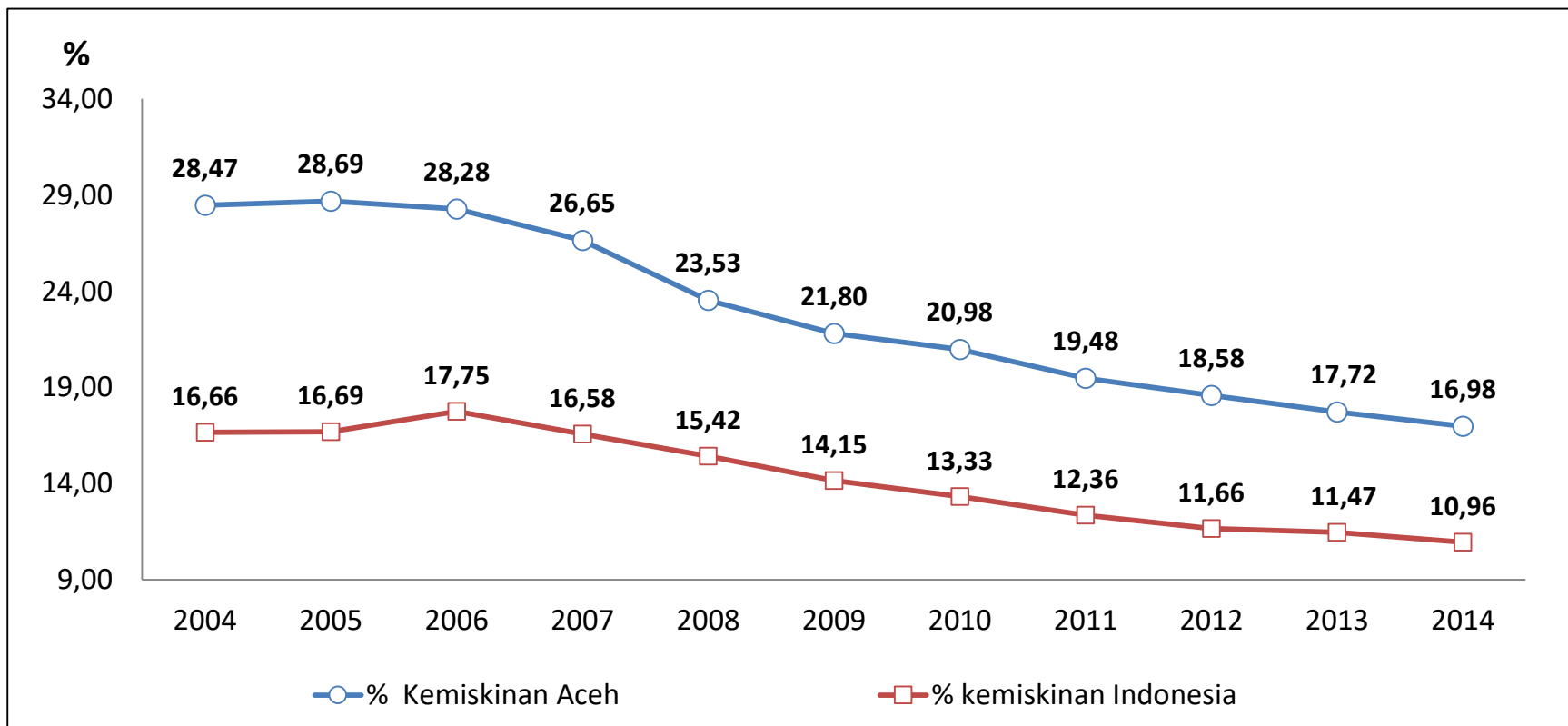


Sumber: BPS, 2015

Tingkat kemiskinan Aceh 2014 masih berada di atas rata-rata Nasional



KEMISKINAN PROVINSI ACEH TERHADAP NASIONAL

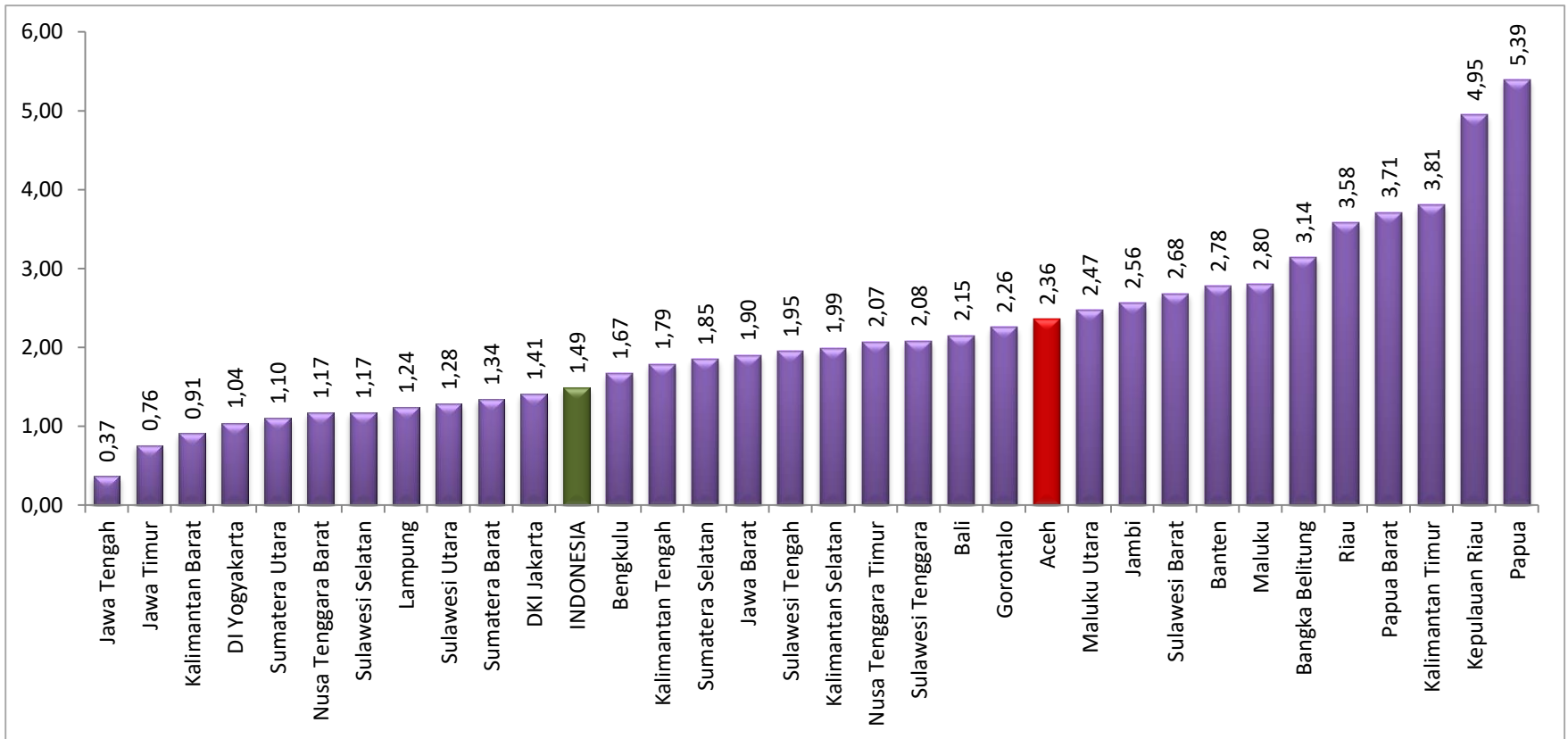


Sumber: BPS, 2015

Tingkat kemiskinan Aceh dari 2004 s.d 2014 selalu berada di atas tingkat kemiskinan Nasional



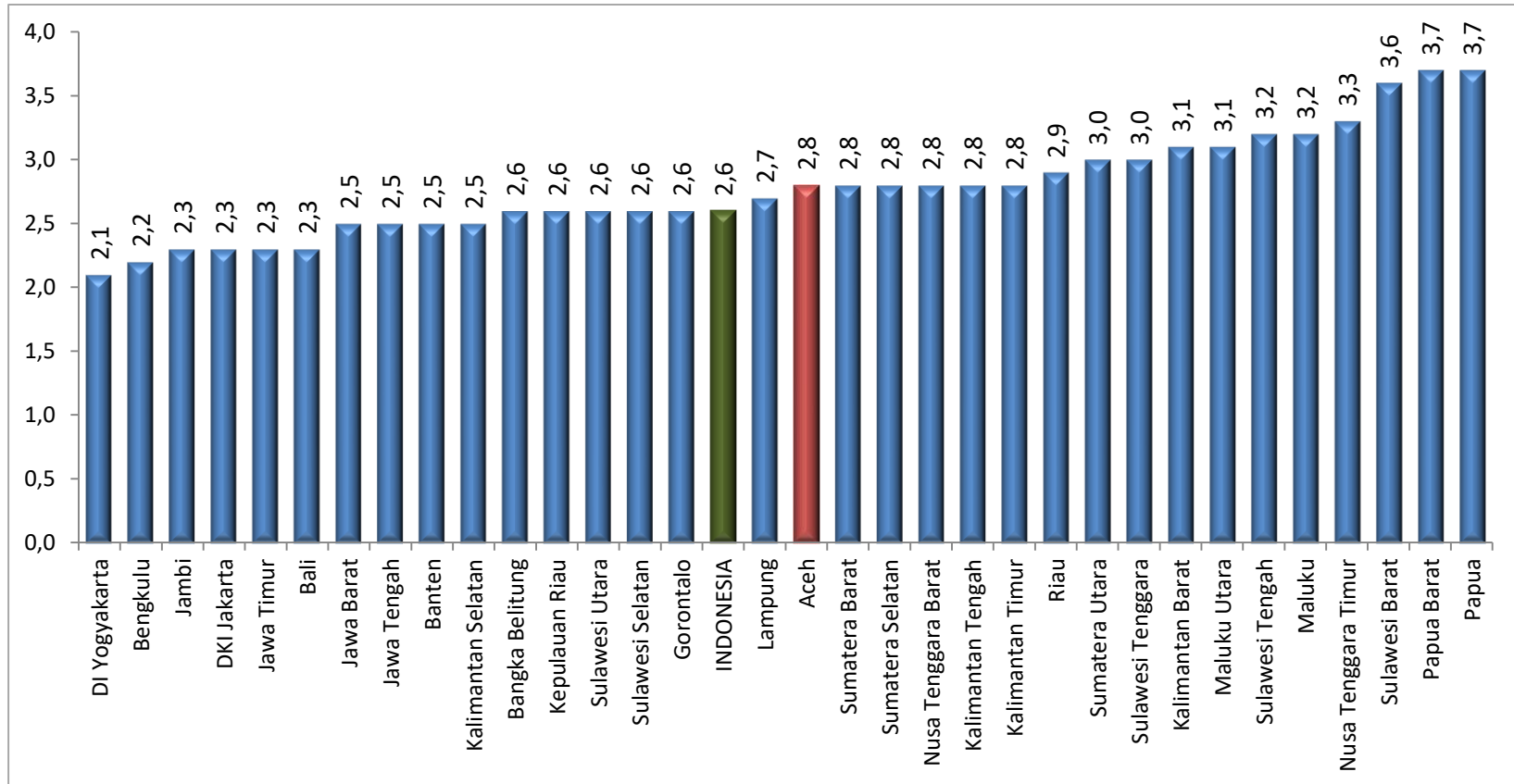
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Provinsi (2000-2010)



- Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Aceh masih sangat tinggi (2.36%)
- Angka tersebut bahkan jauh lebih tinggi dibanding rata-rata laju pertumbuhan penduduk untuk periode 1990-2000 (1,46%)



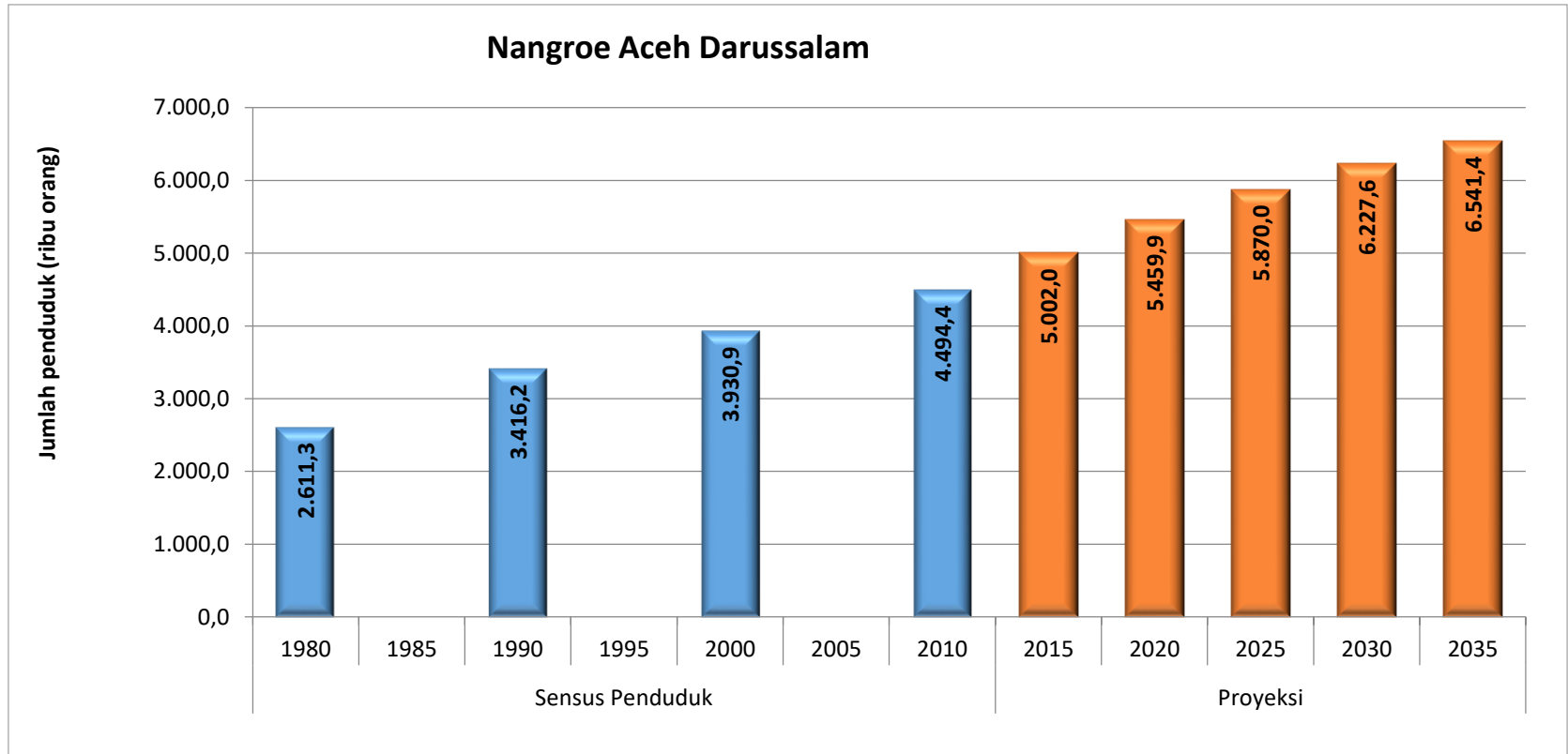
Angka Fertilitas Total (TFR) Menurut Provinsi (2012)



Angka fertilitas total/TFR = Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya



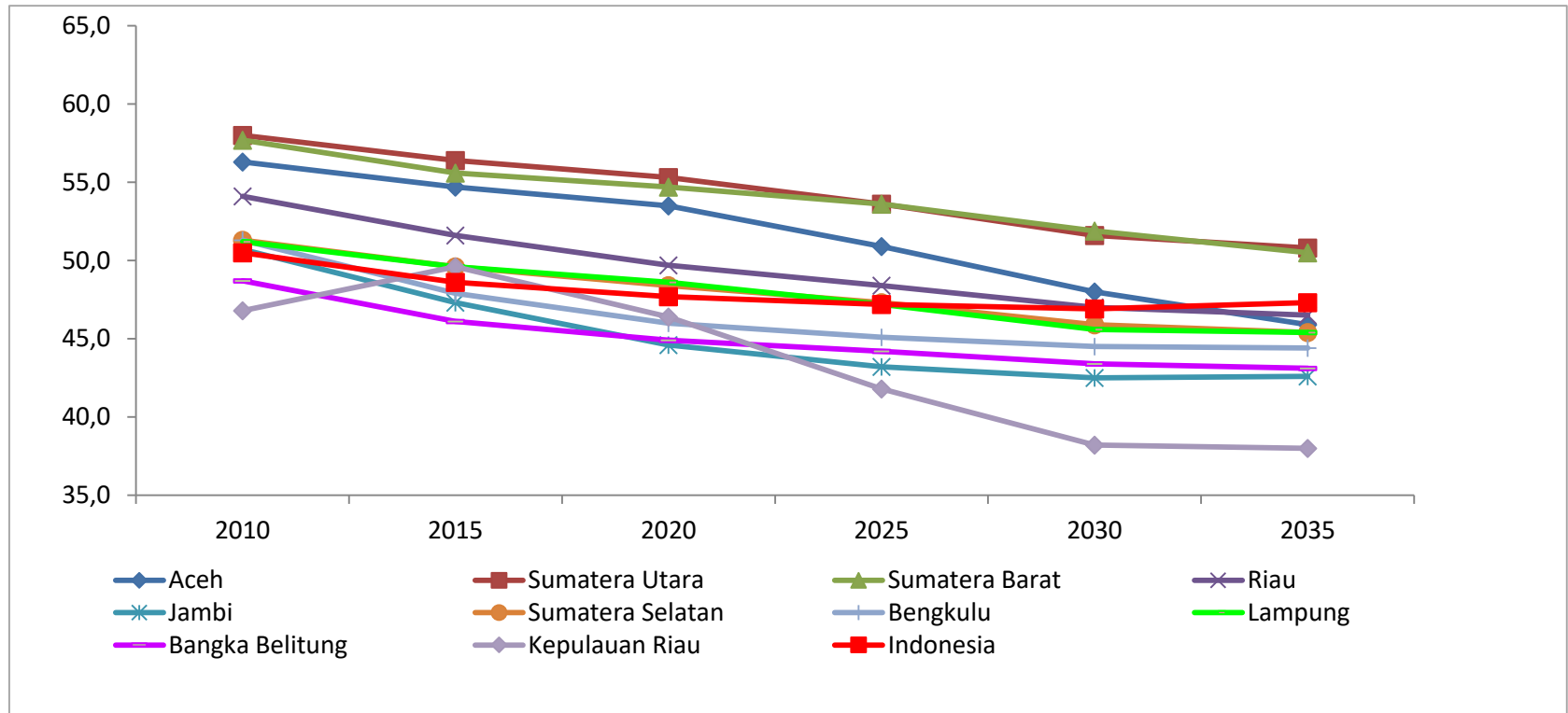
Jumlah penduduk Provinsi Aceh sampai tahun 2010 dan proyeksinya sampai dengan tahun 2035



- Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Aceh meningkat 1,88 juta dan diproyeksikan meningkat sebanyak 2,0 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan
- Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.



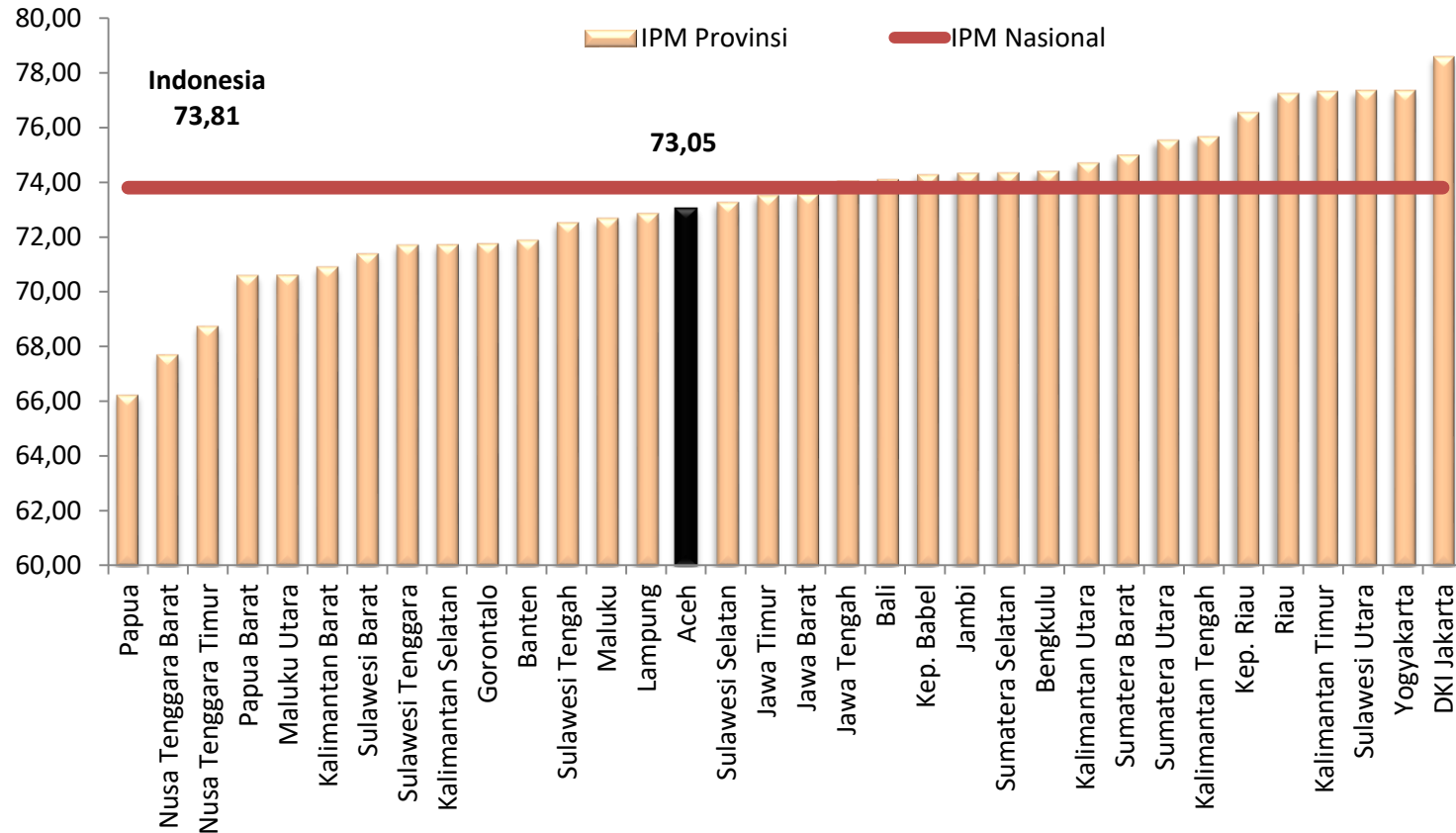
Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi



- Rasio ketergantungan di Provinsi Aceh masih sangat tinggi.
- Rasio ketergantungan dibawah 50% diproyeksikan baru terjadi setelah tahun 2025. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk memastikan terjadinya penurunan rasio ketergantungan ini, termasuk upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan TFR



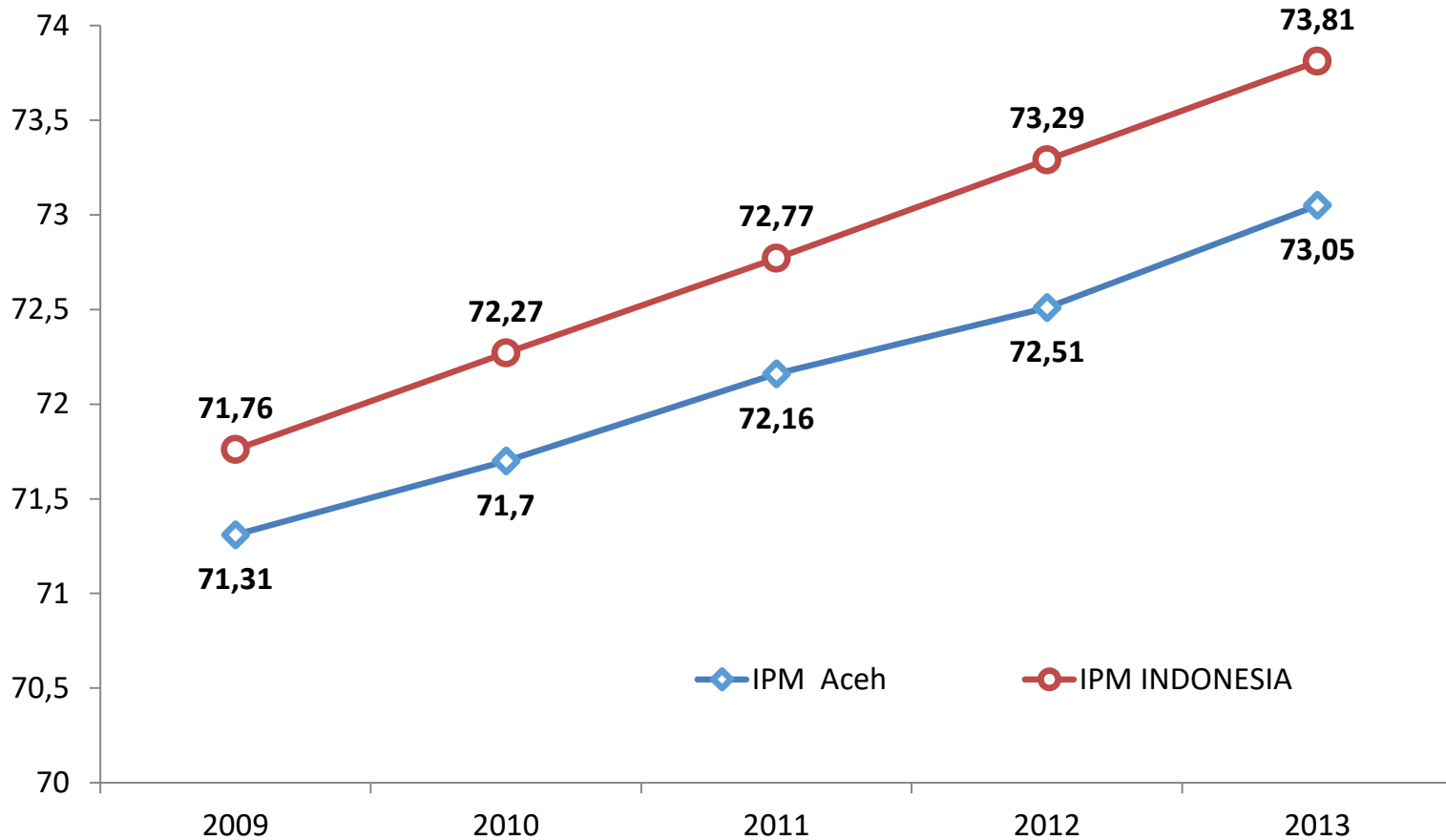
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (IPM) PROV. ACEH TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2013



Sumber: BPS, 2015



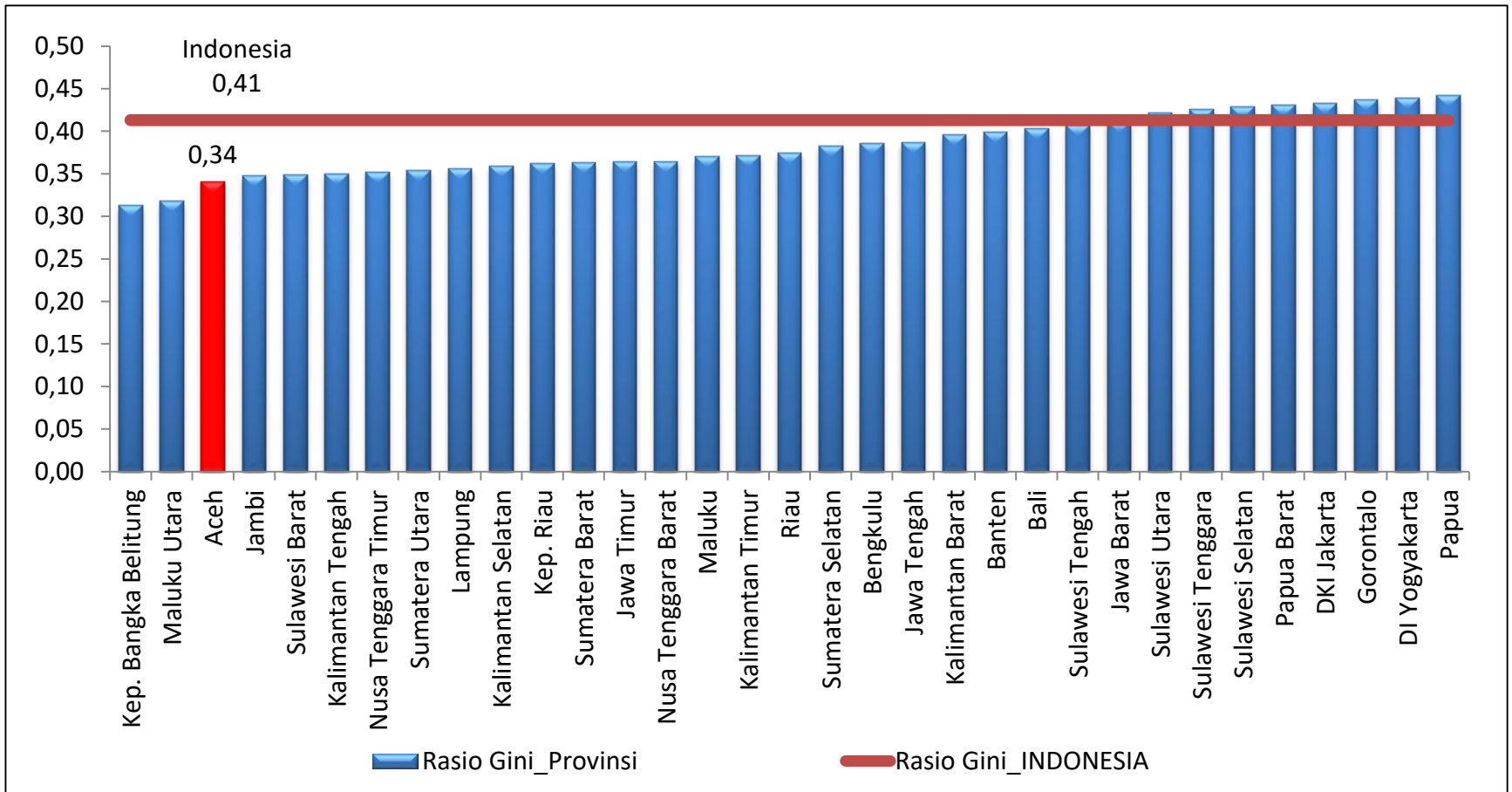
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (IPM) PROV. ACEH TERHADAP NASIONAL TAHUN 2009-2013



Sumber: BPS, 2015



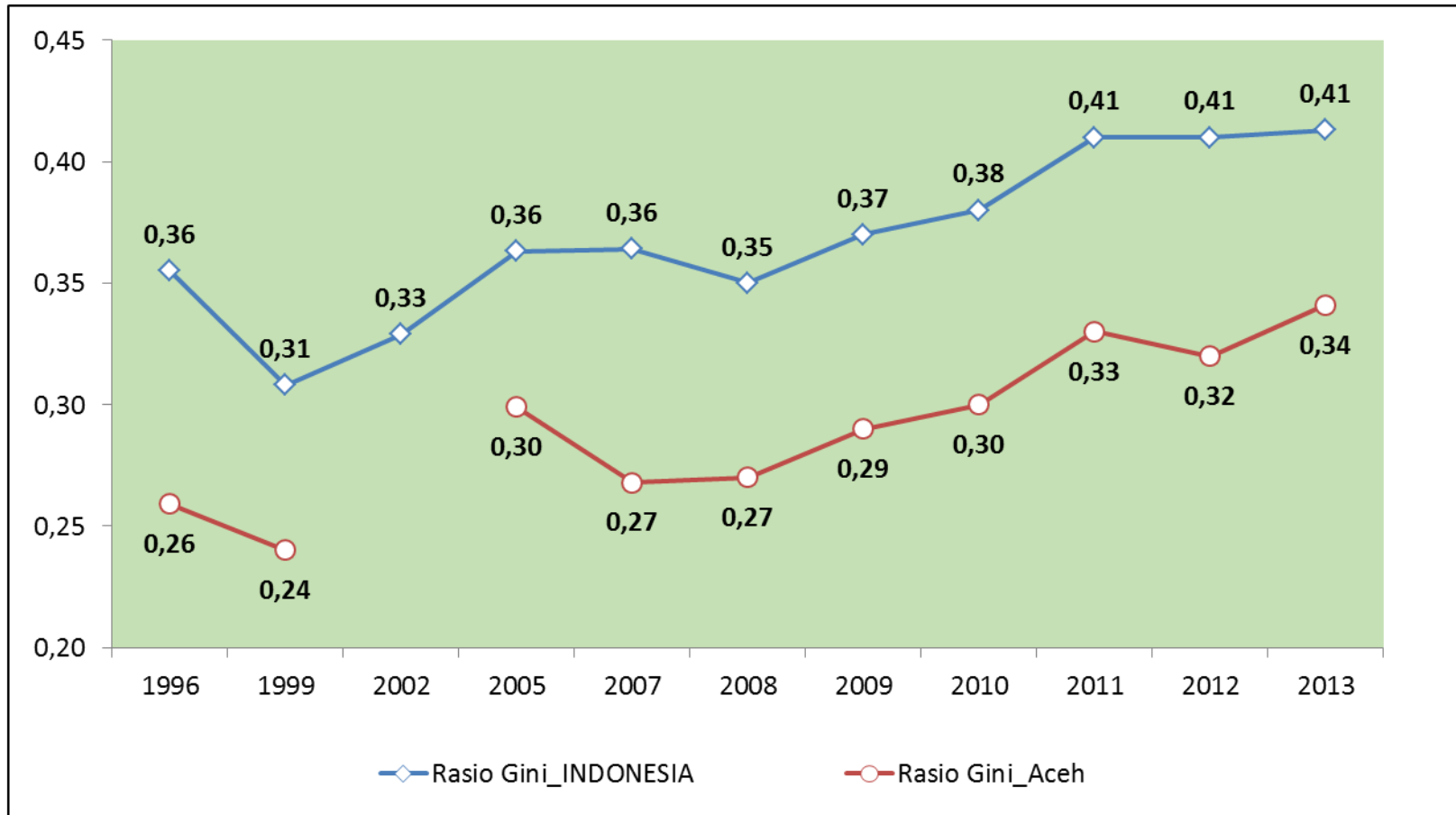
INDEKS RASIO GINI PROVINSI ACEH TERHADAP PROVINSI LAIN



Sumber: BPS, 2014



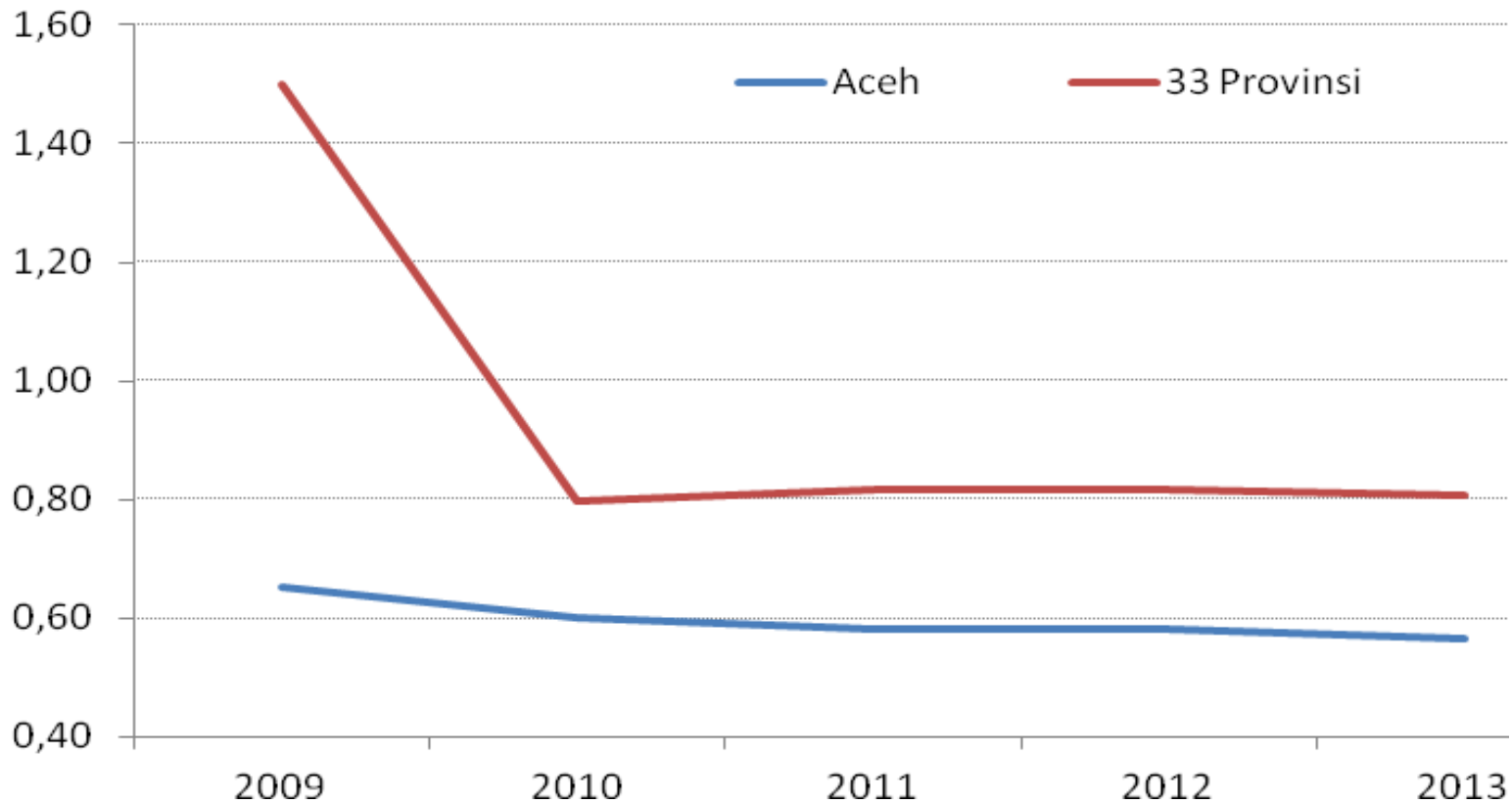
INDEKS RASIO GINI PROVINSI ACEH TERHADAP NASIONAL



Sumber: BPS, 2015



PERKEMBANGAN KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH (Indeks Williamson) TAHUN 2009-2013

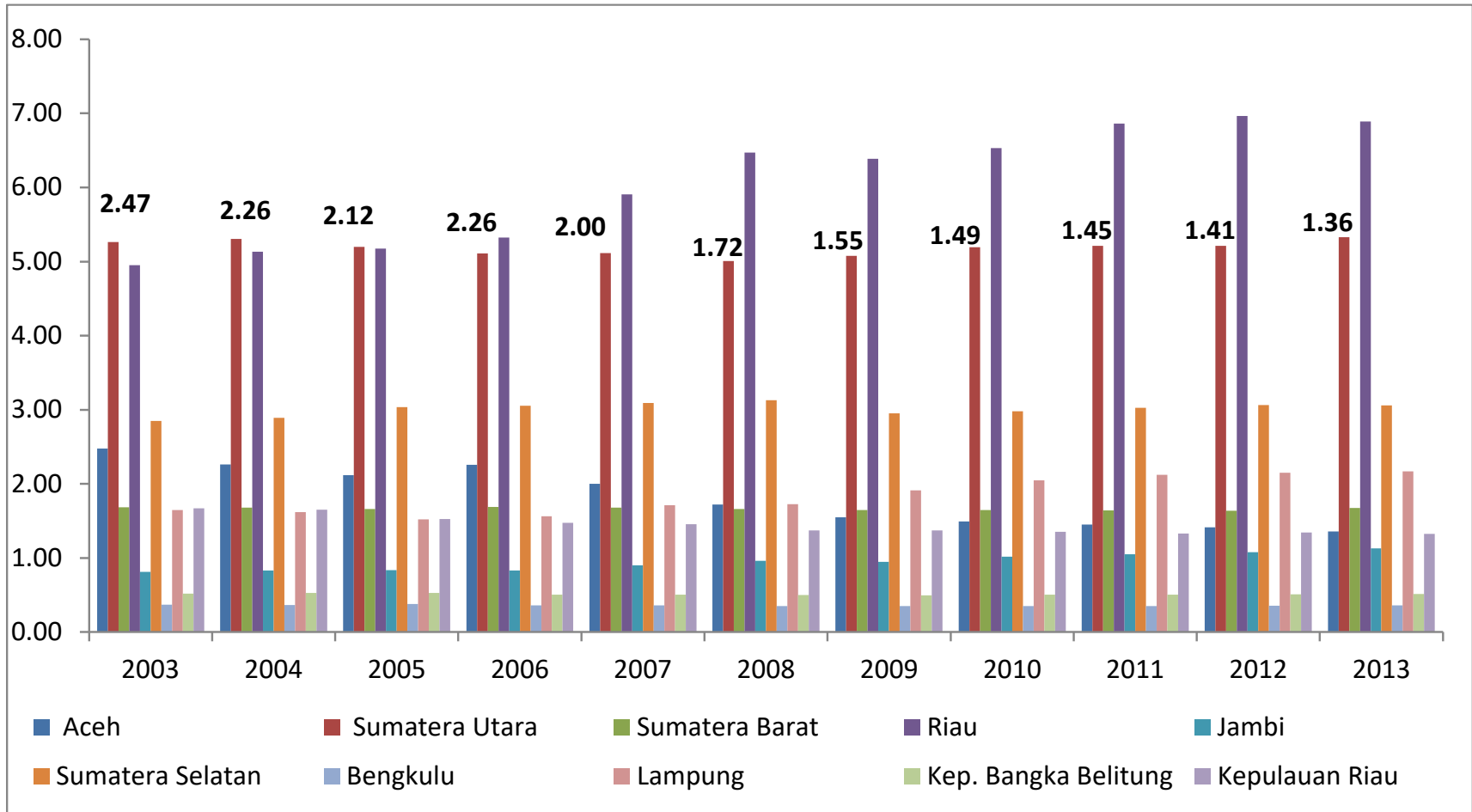


Sumber: BPS , 2013 (diolah)

Kesenjangan antar wilayah semakin menurun yang ditunjukkan dari Indeks Williamson yang menurun dari tahun ke tahun

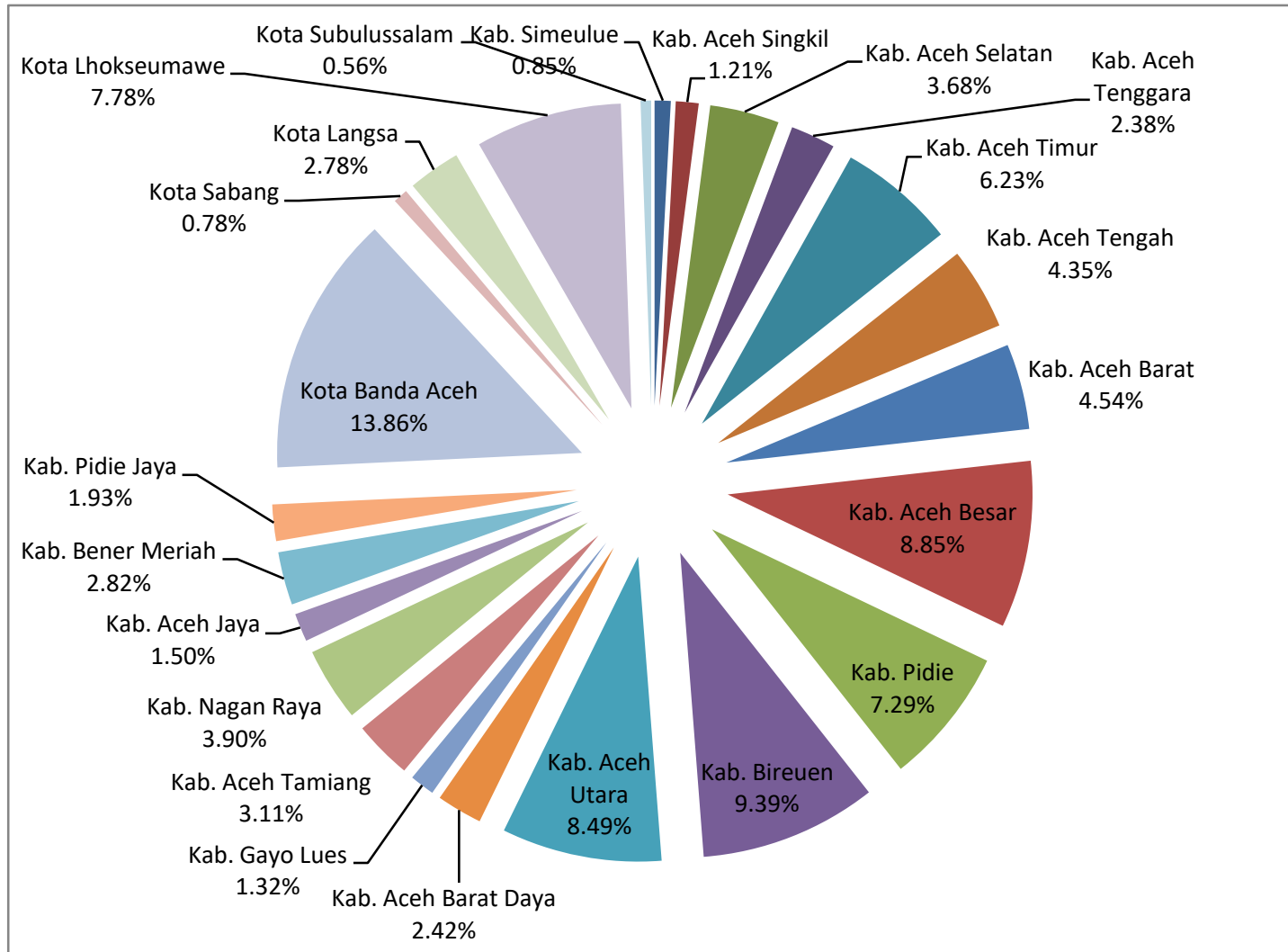


KONTRIBUSI PDRB DI PULAU SUMATERA TERHADAP PDRB NASIONAL (ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2003-2013)





KONTRIBUSI PDRB MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (DALAM PERSEN) (ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2013)





PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA ACEH TAHUN 2007-2013

(Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas)



Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Simeulue	4.718	5.394	6.274	6.741	7.248	7.831	8.407
Aceh Singkil	5.557	5.972	6.519	6.984	7.755	8.488	9.324
Aceh Selatan	9.231	10.359	11.488	11.888	12.803	13.545	14.402
Aceh Tenggara	6.504	6.946	7.853	8.292	9.039	9.866	10.538
Aceh Timur	19.462	21.620	17.649	18.511	19.127	19.499	19.984
Aceh Tengah	11.898	12.732	14.325	15.218	16.735	18.153	19.668
Aceh Barat	12.898	14.696	16.250	17.230	18.411	19.240	20.758
Aceh Besar	12.078	13.399	15.023	16.247	17.685	18.867	19.991
Pidie	7.460	8.467	9.823	10.721	12.053	13.556	15.311
Bireuen	10.307	11.985	13.998	14.757	16.155	17.637	19.138
Aceh Utara	22.853	26.357	23.256	21.091	21.864	22.041	22.160
Aceh Barat Daya	8.178	9.391	10.920	11.744	12.902	13.968	15.190
Gayo Lues	7.953	9.095	10.168	10.707	11.490	12.336	13.231
Aceh Tamiang	7.840	8.484	8.838	9.196	9.667	10.198	10.790
Nagan Raya	14.639	16.712	17.837	18.126	19.300	20.602	22.196
Aceh Jaya	8.341	9.647	10.930	12.460	13.533	14.436	15.442
Bener Meriah	10.173	11.437	13.521	14.477	15.795	17.058	18.273
Pidie Jaya	7.061	7.820	8.777	9.236	10.049	10.927	11.471
Kota Banda Aceh	22.233	26.157	29.822	34.496	39.176	44.173	49.213
Kota Sabang	12.931	14.281	16.113	17.115	18.126	19.149	20.584
Kota Langsa	8.587	9.883	11.540	12.190	12.942	13.747	14.811
Kota Lhokseumawe	59.483	62.281	62.440	60.131	61.778	64.707	65.136
Kota Subussalam	4.155	4.502	4.958	5.250	5.663	6.041	6.579
Aceh	16.849,08	17.053,37	16.714	17.498	18.950	20.164	21.418

Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa

Kesenjangan antardaerah di Aceh dapat dilihat dari perbedaan antara pendapatan per kapita penduduk Kota Lhokseumawe hampir 8 kali lipat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Simeulue.



STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2013 PROVINSI ACEH



NO.	LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI PERSENTASE (%)	
		2005	2013
1.	PERTANIAN	26,69	27,22
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	23,12	9,56
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	18,01	8,10
4.	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,20	0,53
5.	KONSTRUKSI	3,22	11,67
6.	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	12,44	17,66
7.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,15	10,84
8.	KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN	1,47	3,06
9.	JASA-JASA	9,69	11,36
	KONTRIBUSI	100,00	100,00

Sumber: BPS

- Kontribusi PDRB didominasi oleh sektor pertanian (27,22%), perdagangan hotel dan restoran (17,66%)
- Sementara itu sektor industri pengolahan peranannya menurun dari 18,01% menjadi 8,10%



PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)		Perubahan
		(orang)	Orang	%	(orang)
1	Pertanian	869.110	955.595	47,15	86.485
2	Pertambangan	12.483	6.078	0,30	-6.405
3	Industri Pengolahan	75.827	117.161	5,78	41.334
4	Listrik, Gas, Air	3917	9.039	0,45	5.122
5	Bangunan	96.185	139.166	6,87	42.981
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	271.815	330.625	16,31	58.810
7	Angkutan & Telekomunikasi	72.597	62.057	3,06	-10.540
8	Keuangan	9.644	25.147	1,24	15.503
9	Jasa-Jasa	355.092	381.866	18,84	26.774
TOTAL		1.766.670	2026734	100,00	260.064

Sumber: BPS

- Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (47,15%), perdagangan, hotel dan restoran (16,31%), dan jasa (18,84%).
- Selama 4 tahun, pekerja di sektor pertambangan dan angkutan dan telekomunikasi mengalami penurunan terbanyak masing-masing 51% dan 14%.
- Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 5,78% dan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja selama 4 tahun mengalami peningkatan sebesar 54,51%.



ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	2014%	Perubahan
1	≤ SD	736.014	769.419	35,40	33.405
2	SMTp	392.363	447.160	20,57	54.797
3	SMTA Umum	482.559	689.971	31,75	207.412
5	Diploma I/II/III/Akademi	80.595	101.828	4,69	21.233
6	Universitas	101.879	165.026	7,59	63.147
Total		1.793.410	2.173.404	100,00	379.994

Sumber: BPS

- Sebagian angkatan kerja telah menamatkan pendidikan SD (35,40%)



RASIO SIMPANAN DAN PINJAMAN DI BANK UMUM DAN BPR TAHUN 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Aceh	23.117	26.623	0,68	0,54
Sumatera	383.330	447.960	1,17	1,22
Nasional	2.968.535	2.774.641	0,93	0,65

Sumber: BPS

- Potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah.
- Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di DI Aceh adalah bersifat konsumtif.
- Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.
- Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif.



KOMPOSISI APBD PROVINSI ACEH AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

- Hampir 64,85% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (38,14%) dan belanja barang jasa (26,72%).
- Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 12,58%.



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



PENUTUP



RANGKUMAN PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH



- ❑ Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran diatas rata-rata nasional.
- ❑ Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia.
- ❑ Adanya kesenjangan antar golongan maupun antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Rasio Gini dan Indeks Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun.
- ❑ Menurunnya kontribusi perekonomian Provinsi Aceh terhadap perekonomian nasional.
- ❑ Belum optimalnya kontribusi sektor pertanian, sementara sebagian besar penduduk masih bekerja pada sektor pertanian.
- ❑ Menurunnya peranan sektor industri pengolahan.
- ❑ Masih rendah akumulasi tabungan masyarakat serta investasi masyarakat di sektor produktif.
- ❑ Masih rendahnya porsi belanja modal yang merupakan investasi publik.



ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH



- ❑ Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan.
- ❑ Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- ❑ Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan.
- ❑ Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- ❑ Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (investasi).
- ❑ Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat.



REKOMENDASI DAN SARAN

- ❑ Pemberdayaan petani khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas unggulan daerah;
- ❑ Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- ❑ Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna.
- ❑ Peningkatan kemudahan perijinan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan, melalui PTSP dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.
- ❑ Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.
- ❑ Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.
- ❑ Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jaringan jalan dan listrik.
- ❑ Membatalkan perda yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha.



Terima Kasih



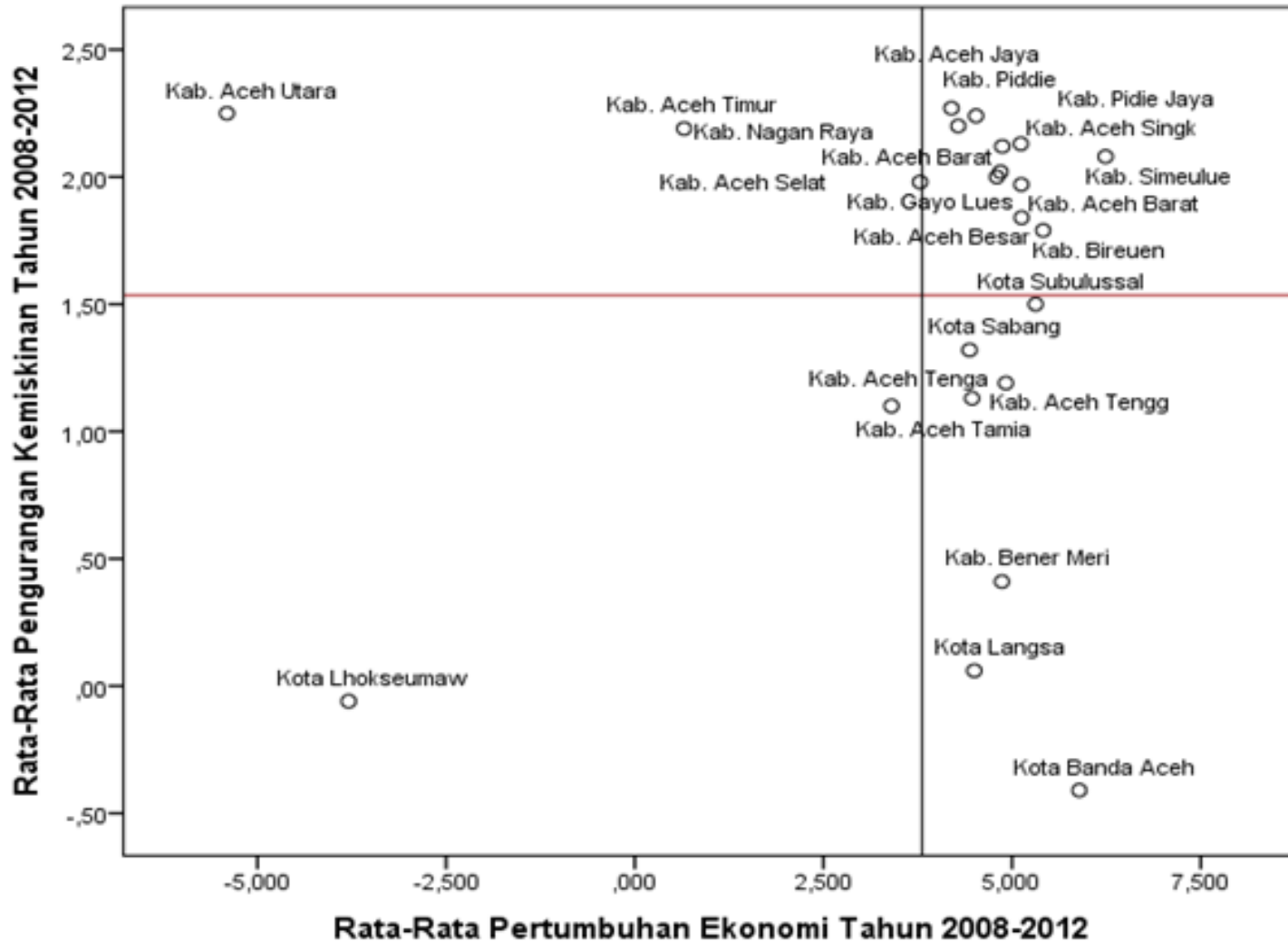
LAMPIRAN



**KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI ACEH**

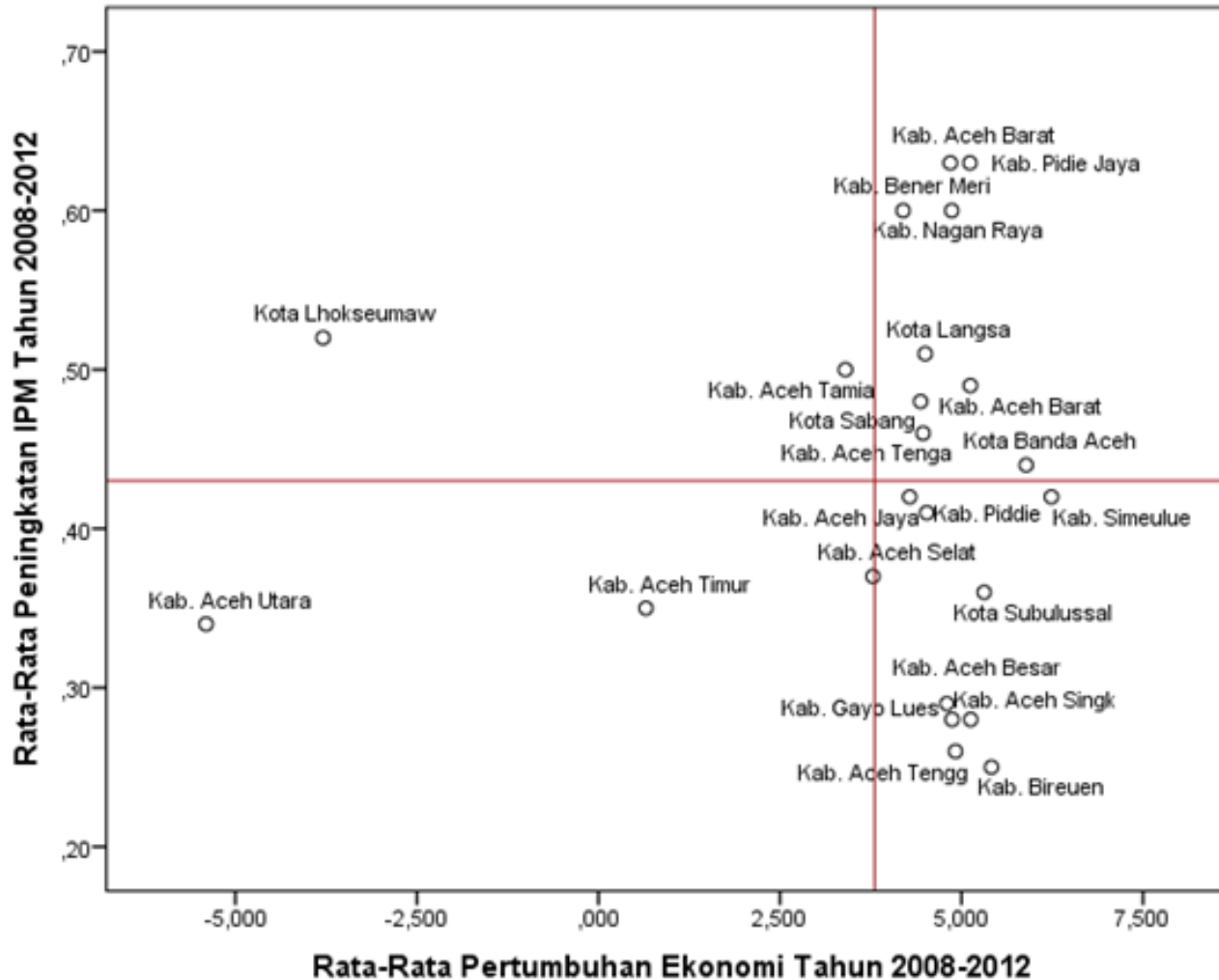


DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN, 2008-2012





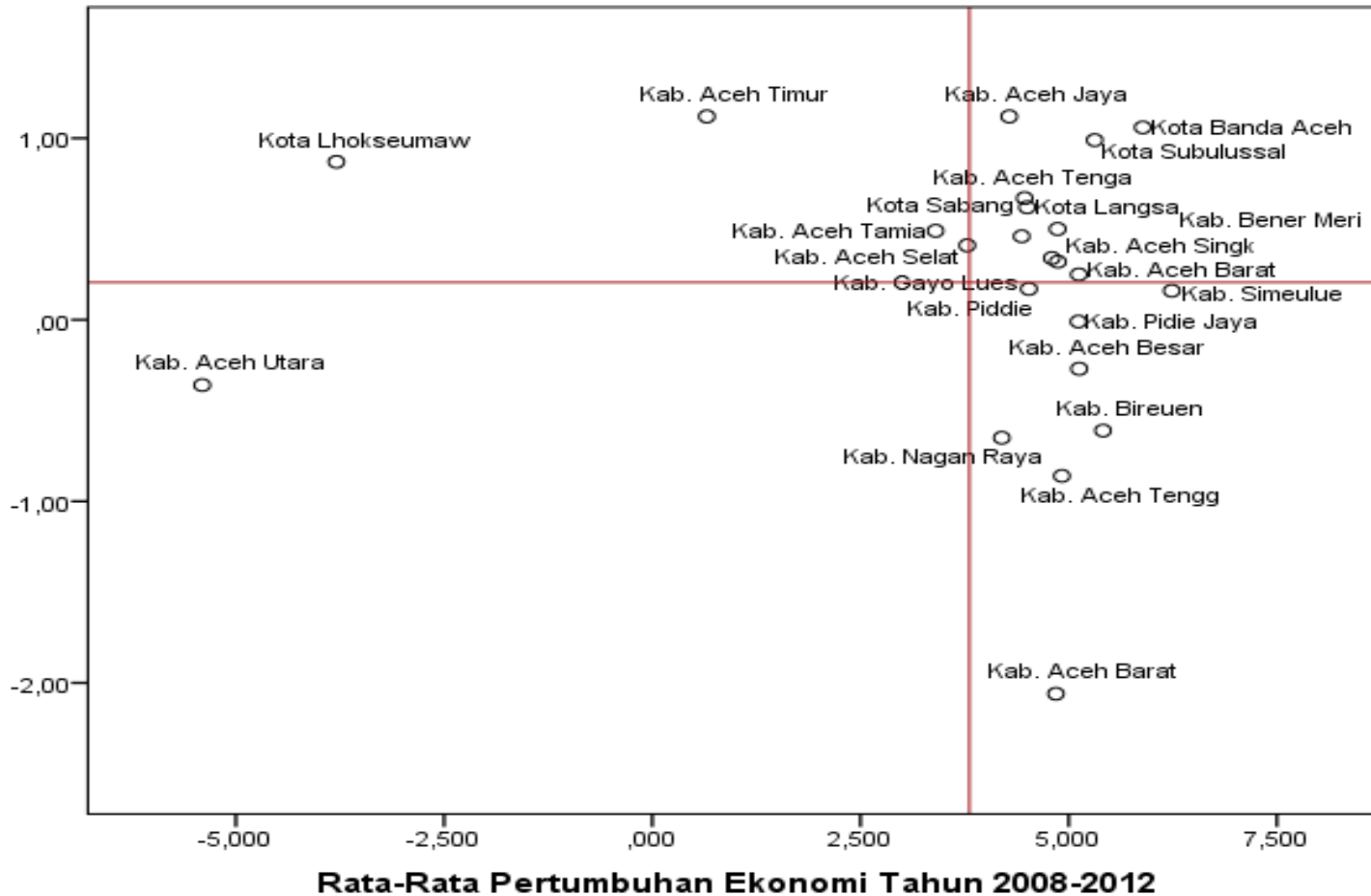
DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN IPM, 2008-2012





DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENGANGGURAN, 2008-2012

Rata-Rata Pengurangan Pengangguran Tahun 2008-2012





DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019 (1/4)



KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL

PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

- Pembangunan Jalur KA Banda Aceh-Lhokseumawe
- Pembangunan jalur KA Banda Lhokseumawe-Langsa-Besitang
- Pembangunan jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe
- Pembangunan jalur KA antara Sigli - Bireun (tahap 1)

PERHUBUNGAN DARAT

- Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan Peunayong)

PERHUBUNGAN UDARA

- Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda
- Pengembangan Bandara Maimun Saleh, Sabang
- Peningkatan Bandara Lasikin
- Peningkatan Bandara Gayo Lues
- Peningkatan Bandara Rambele
- Peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien
- Peningkatan Bandara T.Cut Ali

PERHUBUNGAN LAUT

- Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh
- Pengembangan Pelabuhan Sabang



DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019 (2/4)



KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL

PERHUBUNGAN LAUT

- Pembangunan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh*
- Pembangunan Pelabuhan Susuh di Teluk Surin Aceh Barat Daya
- Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa
- Pengembangan Pelabuhan Singkil

JALAN

- Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang
- Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh
- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue
- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal)
- Pembangunan Jalan Takengon-Sp.Peut

ENERGI

- Revitalisasi kilang LNG Arun 400 mmscfd

ASDP

- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meulaboh*
- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sinabang
- Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Banyak

KETENAGALISTRIKAN

- PLTGU/MGU Sumbagut-2 Peaker (Arun) 250 MW
- PLTU Meulaboh #3 200 MW
- Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi



DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019 (3/4)



KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
- Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

SUMBER DAYA AIR

- Pembangunan Waduk Jambo Aye Kab. Aceh Utara & Timur
- Pembangunan Waduk Kreuto Aceh Utara
- Pembangunan Waduk Rukoh & Tiro Pidie
- Pembangunan Waduk Lawe Mamas I Aceh Tenggara
- Pembangunan Waduk Lawe Atas Aceh Tenggara
- Pembangunan Waduk Lawe Mamas II Aceh Tenggara
- *Integrated Participatory Development and Management Lhok Guci Irrigation* Aceh Jaya
- Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Pase Aceh Utara
- Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan Aceh Utara
- Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jamuan (extension) Aceh Utara
- Pembangunan Bendung D.I. Peureulak Aceh Timur
- Pembebasan Lahan D.I. Peureulak & D.I. Lhok Guci Aceh Timur dan Aceh Jaya
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Kr. Singkil Aceh Singkil - Kota Subulussalam
- Pengendalian Banjir Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil



DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019 (4/4)



KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL

SUMBER DAYA AIR (Lanjutan)

- Pengamanan Pantai Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat
- Pengamanan Muara Krueng Peudada Bireun
- Pembangunan Pengamanan Pantai krueng Raya kec. Masjid Raya Aceh Besar
- Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Aceh Utara Aceh Utara
- Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Aceh Singkil Aceh Singkil
- Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Nagan Raya Nagan Raya
- RESTORASI SUNGAI Sungai Lawe Alas Dan Lawe Bulan A. Tenggara & Aceh Singkil
- RESTORASI SUNGAI Sungai Kr. Baro. Kr. Tiro Dan Krueng Aceh Aceh Besar, Pidie Dan Pidie Jaya

PENDIDIKAN

- Science Park Berbasis Kebencanaan di Kota Banda Aceh
- Techno Park berbasis komoditas kopi (di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meria) dan kakao (Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya).
- Techno Park berbasis lobster dan udang di kabupaten Simeulue
- Penambahan 2 rumah budaya

KESEHATAN

- Peningkatan kapasitas RS regional (6 RS)
- Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas baru, rehabilitasi puskesmas, pusling)
- Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan